LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur



labuan bajo 2025

www.manggaraibaratkab.go.id
pemerintahanumum.setdamabar@gmail.com

enchanting labuan bajo











PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Daniel Daeng Nabit – Labuan Bajo

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor : INSPEK/000.5.3.1/146/III/2026

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Labuan Bajo, 31 Maret 2026

Inspektur
Kabupaten Manggarai Barat,

Blasius Nurdin Oban, S.Sos, S.ST, MM,CIAP,CGAA,CGCAE
Pembina TK.I
Nip. 197111021999031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan perkenanan-Nya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah berhasil merampungkan penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025**. Dokumen ini disusun sebagai manifestasi akuntabilitas publik dan pemenuhan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, serta secara teknis berpedoman pada **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019** dan **Permendagri Nomor 19 Tahun 2024**.

Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, LPPD ini merupakan instrumen evaluasi komprehensif yang menyajikan kinerja penyelenggaraan urusan desentralisasi, pelaksanaan tugas pembantuan, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seluruh parameter capaian dalam laporan ini diukur melalui mekanisme **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome**, yang diselaraskan dengan target-target strategis dalam **Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021-2026**.

LPPD Tahun 2025 ini secara analitis menampilkan *trend* perkembangan kinerja pemerintah daerah, yang mencerminkan fluktuasi serta progresivitas pembangunan dari tahun 2024 dan 2025. Melalui penyajian data yang terintegrasi, laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi nasional, sekaligus menjadi cermin bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kami menyadari bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat sepanjang tahun 2025 masih diperhadapkan pada berbagai tantangan sektoral. Oleh karena itu, substansi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan mampu menjawab evaluasi atas efektivitas program kerja yang telah dijalankan, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat, serta menjadi bukti komitmen kami dalam mengakselerasi perubahan positif bagi kesejahteraan seluruh elemen masyarakat.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI, SE

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR		.....	**i**
DAFTAR ISI		.....	**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	.....	**1**
	1.1 Latar Belakang	.....	**1**
	1.1.1 Penjelasan Umum	.....	**1**
	a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	.....	**1**
	b. Data Geografis Wilayah	.....	**2**
	c. Jumlah Penduduk	.....	**3**
	d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	.....	**5**
	e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	..	**5**
	f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	.....	**8**
	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	.....	**14**
	a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	.....	**14**
	b. Visi dan Misi Kepala Daerah	.....	**17**
	c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	.....	**20**
	d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	.....	**25**
	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	.....	**54**
BAB II	**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	.....	**61**
	2.1 Capaian Kinerja Makro	.....	**61**
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	.....	**61**

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci..... 62
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... 79
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah..... 83
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 83
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja..... 85
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Pada Tahun Sebelumnya..... 86
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2026..... 88

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... 146
3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat..... 146
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat..... 148
3.3 Permasalahan dan Kendala..... 148
3.4 Saran Dan Tindak Lanjut..... 148

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... 150
4.1 Urusan Pendidikan..... 150
4.2 Urusan Kesehatan..... 159
4.3 Urusan Pekerjaan Umum..... 184
4.4 Urusan Perumahan Rakyat..... 189
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 193
4.6 Urusan Sosial..... 213

BAB V PENUTUP..... 223

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.

Kabupaten Manggarai Barat menjadi sebuah daerah otonom dibentuk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. TAP MPR RI Nomor: IV/MPR/1998 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 2019; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 845).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2).

b. Data Geografis Wilayah.

Kabupaten Manggarai Barat terletak pada 08^0 14 LS-09^0.00 LS dan 119^0.21 BT-120^0.20 BT dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape

Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas 10.000,47 km^2 dengan luas daratan 2.974,5 km^2 dan luas laut 7.052,97 km^2.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi yang bervariasi dengan tingkat kemiringan ± 30^0 dengan tingkat curah hujan sedang.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat terbagi atas 12 Kecamatan dan 169 desa/ kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

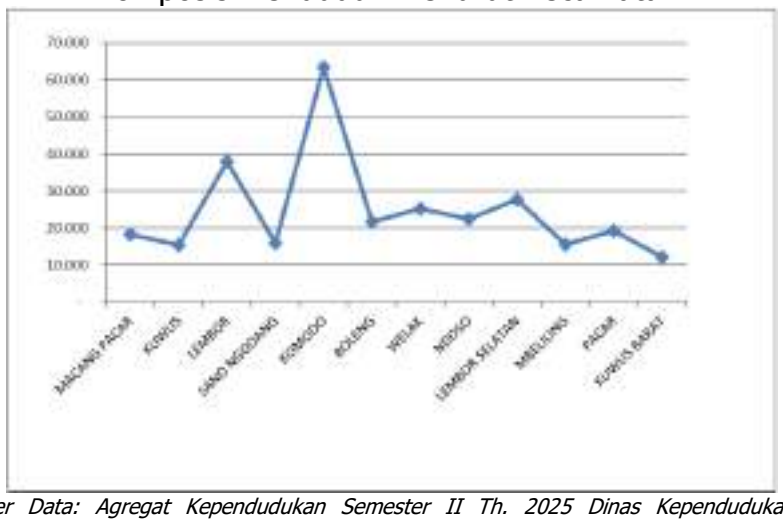
1) Kecamatan Komodo terdiri dari 17 Desa dan 2 Kelurahan
2) Kecamatan Sano Nggoang terdiri dari 15 Desa
3) Kecamatan Kuwus terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa
4) Kecamatan Lembor terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa
5) Kecamatan Macang Pacar terdiri dari 13 Desa
6) Kecamatan Boleng terdiri dari 11 Desa
7) Kecamatan Welak terdiri dari 16 Desa
8) Kecamatan Ndoso terdiri dari 15 Desa
9) Kecamatan Mbeliling terdiri dari 15 Desa
10) Kecamatan Lembor Selatan terdiri dari 15 Desa
11) Kecamatan Pacar terdiri dari 13 Desa

12) Kecamatan Kuwus Barat terdiri dari 10 Desa

c. Jumlah Penduduk.

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 297.839 jiwa dan 88.164 KK.
2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 149,729 jiwa dan perempuan sebanyak 148,110 jiwa.
3. Komposisi penduduk menurut kecamatan:
   a. Kecamatan Komodo sebanyak 64,491jiwa
   b. Kecamatan Sano Nggoang sebanyak 16,072 jiwa
   c. Kecamatan Kuwus sebanyak 15,458 jiwa
   d. Kecamatan Lembor sebanyak 38,137 jiwa
   e. Kecamatan Macang Pacar sebanyak 18,506 jiwa
   f. Kecamatan Boleng sebanyak 21,812 jiwa
   g. Kecamatan Welak sebanyak 25,479 jiwa
   h. Kecamatan Ndoso sebanyak 22,639 jiwa
   i. Kecamatan Mbeliling sebanyak 15,579 jiwa
   j. Kecamatan Lembor Selatan sebanyak 38,137 jiwa
   k. Kecamatan Pacar sebanyak 19,455 jiwa
   l. Kecamatan Kuwus Barat sebanyak 15,458 jiwa

Komposisi Penduduk Menurut Kecamatan.



Sumber Data: Agregat Kependudukan Semester II Th. 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.

4. Komposisi penduduk menurut struktur usia.

1)	0 – 4	= 23,207 orang
2)	5 – 9	= 28,612 orang
3)	10 – 14	= 27,770 orang
4)	15 – 19	= 27,327 orang
5)	20 – 24	= 32,158 orang
6)	25 – 29	= 28,967 orang
7)	30 – 34	= 22,700 orang
8)	35 – 39	= 20,236 orang
9)	40 – 44	= 18,487 orang
10)	45 – 49	= 15,878 orang
11)	50 – 54	= 14,197 orang
12)	55 – 59	= 12,495 orang
13)	60 – 64	= 9,242 orang
14)	65 – 69	= 6,930 orang
15)	70 – 74	= 3,955 orang
16)	>=75	= 5,678 orang

5. Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan.

Belum/Tidak Sekolah	: 58,414 orang
BelumTamat SD	: 37,568 orang
SD/Sederajat	: 90,187 orang
SLTP/Sederajat	: 33,855 orang
SLTA/Sederajat	: 55,336 orang
Diploma I/II	: 1,088 orang
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	: 3,328 orang
Diploma IV/Strata I	: 17,758 orang
Strata II	: 292 orang
Strata III	: 13 orang

6. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama.

Katholik	: 235,838 orang
Kristen	: 2,199 orang
Islam	: 59,536 orang
Budha	: 22 orang
Hindu	: 239 orang
Konghuchu	: 1 orang
Kepercayaan	: 4 orang

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

No.	Kecamatan/Desa/kelurahan	Jumlah
1.	Kecamatan	12
2.	Kelurahan	5
3.	Desa	164

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

I. SEKRETARIAT DAERAH
   a. Sekretaris Daerah
   b. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
   c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   d. Asisten Administrasi Umum
   e. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
   f. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
   g. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
   h. Bagian Tata Pemerintahan
   i. Bagian Hukum

j. Bagian Kesejahteraan Rakyat
k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
l. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
m. Bagian Administrasi Pembangunan
n. Bagian Organisasi
o. Bagian Umum
p. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah
q Bagian Perencanaan Dan Keuangan

II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

III. INSPEKTORAT DAERAH

IV. DINAS DAERAH

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Sumber Daya Air Bina Marga, Bina Kontruksi
d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
e. Dinas Lingkungan Hidup, dan Pertanahan
f. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
g. Satuan Polisi Pamong Praja
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
i. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
j. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
l. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
n. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan UKM

q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
r. Dinas Komunikasi dan Informatika
s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
t. Dinas Perhubungan
u. Inspektorat Daerah

V. BADAN DAERAH
a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
b. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
f. Badan Pendapatan Daerah

VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO

VII. KECAMATAN
a. Kecamatan Komodo
b. Kecamatan Lembor
c. Kecamtan Lembor Selatan
d. Kecamatan Kuwus
e. Kecamatan Macang Pacar
f. Kecamatan Boleng
g. Kecamatan Mbeliling
h. Kecamatan Welak
i. Kecamatan Ndoso
j. Kecamatan Sano Nggoang
k. Kecamatan Kuwus Barat
l. Kecamatan Pacar

VIII. KELURAHAN
a. Kelurahan Labuan Bajo
b. Kelurahan Wae kelambu
c. Kelurahan Tangge

d. Kelurahan Nantal

e. Kelurahan Golo Ru,u

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada APBD induk tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.1.451.919.391.319,30 dan Pergeseran Setelah APBD Perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1.334.748.548.539,07 sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.314.685.615.275,24 atau sebesar 98,49%.

Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.1.427.862.493.483,30 dan pada Pergeseran Setelah APBD Perubahan tahun anggaran 2025 ditargetkan menjadi Rp.1.331.846.765.781,07 dan realisasi sebesar Rp.1.209.222.941.388,66 atau sebesar 90,79%.

Tabel 1

Realisasi APBD Tahun 2025

Uraian Urusan, Organisasi, Program	Realisasi				
	Operasi	Modal	Tak Terduga	Transfer	Jumla Belanja
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**639.741.235.454,02**	**88.226.844.315,00**	**0,00**	**0,00**	**727.968.079.769,02**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**340.856.304.102,01**	**26.490.706.473,00**	**0,00**	**0,00**	**367.347.010.575,01**
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	**340.601.522.802,01**	**26.471.809.073,00**	**0,00**	**0,00**	**367.073.331.875,01**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.338.621.048,00	0,00	0,00	0,00	271.338.621.048,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60.348.411.248,01	26.471.809.073,00	0,00	0,00	86.820.220.321,01
03.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.914.490.506,00	0,00	0,00	0,00	8.914.490.506,00
SPNF SKB Manggarai Barat	**254.781.300,00**	**18.897.400,00**	**0,00**	**0,00**	**273.678.700,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.284.600,00	0,00	0,00	0,00	84.284.600,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	170.496.700,00	18.897.400,00	0,00	0,00	189.394.100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**248.059.253.493,01**	**38.839.255.492,00**	**0,00**	**0,00**	**286.898.508.985,01**
Dinas Kesehatan	**138.706.338.313,00**	**30.395.705.813,00**	**0,00**	**0,00**	**169.102.044.126,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78.035.328.390,00	3.359.068.713,00	0,00	0,00	81.394.397.103,00
02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.573.142.697,00	27.036.637.100,00	0,00	0,00	81.609.779.797,00
03.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.582.577.030,00	0,00	0,00	0,00	4.582.577.030,00
04.PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	493.570.336,00	0,00	0,00	0,00	493.570.336,00
05.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.021.719.860,00	0,00	0,00	0,00	1.021.719.860,00
Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	**95.593.816.658,88**	**8.443.549.679,00**	**0,00**	**0,00**	**104.037.366.337,88**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.818.600.829,88	3.968.490.742,00	0,00	0,00	30.787.091.571,88
02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.650.384.961,00	4.475.058.937,00	0,00	0,00	55.125.443.898,00
03.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.124.830.868,00	0,00	0,00	0,00	18.124.830.868,00
UPTD Puskesmas Labuan Bajo	**2.821.770.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.821.770.268,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.821.770.268,00	0,00	0,00	0,00	2.821.770.268,00
UPTD Puskesmas Benteng	**693.766.172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.766.172,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	693.766.172,00	0,00	0,00	0,00	693.766.172,00
UPTD Puskesmas Rekas	**329.234.302,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.234.302,38**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	329.234.302,38	0,00	0,00	0,00	329.234.302,38
UPTD Puskesmas Werang	**643.366.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.366.728,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	643.366.728,00	0,00	0,00	0,00	643.366.728,00
UPTD Puskesmas Warsawe	**360.541.706,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.541.706,32**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	360.541.706,32	0,00	0,00	0,00	360.541.706,32

UPTD Puskesmas Wae Nakeng	**1.541.241.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541.241.682,50**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.541.241.682,50	0,00	0,00	0,00	1.541.241.682,50
UPTD Puskesmas Datak	**484.879.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.879.558,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	484.879.558,00	0,00	0,00	0,00	484.879.558,00
UPTD Puskesmas Nangalili	**569.092.080,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.092.080,93**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	569.092.080,93	0,00	0,00	0,00	569.092.080,93
UPTD Puskesmas Lengkong Cepang	**565.982.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.982.449,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	565.982.449,00	0,00	0,00	0,00	565.982.449,00
UPTD Puskesmas Wae Kanta	**411.042.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.042.167,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	411.042.167,00	0,00	0,00	0,00	411.042.167,00
UPTD Puskesmas Orong	**558.067.489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.067.489,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	558.067.489,00	0,00	0,00	0,00	558.067.489,00
UPTD Puskesmas Golo Welu	**560.394.923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.394.923,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	560.394.923,00	0,00	0,00	0,00	560.394.923,00
UPTD Puskesmas Ranggu	**309.899.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.899.380,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	309.899.380,00	0,00	0,00	0,00	309.899.380,00
UPTD Puskesmas Tentang	**499.587.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.587.222,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	499.587.222,00	0,00	0,00	0,00	499.587.222,00
UPTD Puskesmas Pacar	**509.466.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.466.528,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	509.466.528,00	0,00	0,00	0,00	509.466.528,00
UPTD Puskesmas Bari	**347.532.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.532.619,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	347.532.619,00	0,00	0,00	0,00	347.532.619,00
UPTD Puskesmas Rego	**401.788.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.788.145,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	401.788.145,00	0,00	0,00	0,00	401.788.145,00
UPTD Puskesmas Terang	**776.317.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776.317.755,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	776.317.755,00	0,00	0,00	0,00	776.317.755,00
UPTD Puskesmas Waning	**388.603.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.603.811,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	388.603.811,00	0,00	0,00	0,00	388.603.811,00
UPTD Puskesmas Nanga Terang	**311.963.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.963.386,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	311.963.386,00	0,00	0,00	0,00	311.963.386,00
UPTD Puskesmas Wae Pitak	**306.669.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.669.080,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	306.669.080,00	0,00	0,00	0,00	306.669.080,00
UPTD Puskesmas Compang	**367.891.069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.891.069,00**
01.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	367.891.069,00	0,00	0,00	0,00	367.891.069,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**30.255.287.218,00**	**20.744.999.398,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000.286.616,00**
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	**7.182.330.309,00**	**20.568.691.326,00**	**0,00**	**0,00**	**27.751.021.635,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.937.034.461,00	69.141.900,00	0,00	0,00	5.006.176.361,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.212.097.330,00	81.584.000,00	0,00	0,00	1.293.681.330,00
03.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	446.690.304,00	20.417.965.426,00	0,00	0,00	20.864.655.730,00
04.PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	586.508.214,00	0,00	0,00	0,00	586.508.214,00
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	**23.072.956.909,00**	**176.308.072,00**	**0,00**	**0,00**	**23.249.264.981,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.300.731.636,00	76.400.190,00	0,00	0,00	4.377.131.826,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.426.088.612,00	0,00	0,00	0,00	11.426.088.612,00
03.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.999.735.099,00	0,00	0,00	0,00	5.999.735.099,00
04.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	281.038.396,00	99.907.882,00	0,00	0,00	380.946.278,00
05.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	607.559.800,00	0,00	0,00	0,00	607.559.800,00
06.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	457.803.366,00	0,00	0,00	0,00	457.803.366,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**6.673.160.444,00**	**1.890.204.782,00**	**0,00**	**0,00**	**8.563.365.226,00**
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	**6.673.160.444,00**	**1.890.204.782,00**	**0,00**	**0,00**	**8.563.365.226,00**
01.PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	453.154.958,00	0,00	0,00	0,00	453.154.958,00
02.PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.848.899.157,00	0,00	0,00	0,00	1.848.899.157,00
03.PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.371.106.329,00	1.890.204.782,00	0,00	0,00	6.261.311.111,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**8.632.983.696,00**	**233.725.170,00**	**0,00**	**0,00**	**8.866.708.866,00**
Satuan Polisi Pamong Praja	**5.860.362.709,00**	**233.725.170,00**	**0,00**	**0,00**	**6.094.087.879,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.860.483.004,00	0,00	0,00	0,00	3.860.483.004,00
02.PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.401.336.200,00	163.795.170,00	0,00	0,00	1.565.131.370,00
03.PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	598.543.505,00	69.930.000,00	0,00	0,00	668.473.505,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**2.772.620.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.772.620.987,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.237.525.794,00	0,00	0,00	0,00	2.237.525.794,00
02.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	535.095.193,00	0,00	0,00	0,00	535.095.193,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**5.264.246.501,00**	**27.953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.292.199.501,00**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	**5.264.246.501,00**	**27.953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.292.199.501,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.881.974.274,00	3.200.000,00	0,00	0,00	2.885.174.274,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	106.805.400,00	0,00	0,00	0,00	106.805.400,00
03.PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.355.000,00	0,00	0,00	0,00	9.355.000,00
04.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.940.674.727,00	0,00	0,00	0,00	1.940.674.727,00
05.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	107.370.100,00	24.753.000,00	0,00	0,00	132.123.100,00
06.PROGRAM PENANGANAN BENCANA	218.067.000,00	0,00	0,00	0,00	218.067.000,00
	57.531.228.897,00	**376.895.549,00**	**0,00**	**0,00**	**57.908.124.446,00**

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**4.879.204.356,00**	**56.631.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.935.835.856,00**
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	**4.879.204.356,00**	**56.631.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.935.835.856,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.582.182.938,00	8.000.000,00	0,00	0,00	2.590.182.938,00
02.PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
03.PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.431.489.712,00	48.631.500,00	0,00	0,00	1.480.121.212,00
04.PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	189.253.475,00	0,00	0,00	0,00	189.253.475,00
05.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	674.178.231,00	0,00	0,00	0,00	674.178.231,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**447.862.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.862.383,00**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	**447.862.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.862.383,00**
01.PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	296.130.000,00	0,00	0,00	0,00	296.130.000,00
02.PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	70.795.400,00	0,00	0,00	0,00	70.795.400,00
03.PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	80.936.983,00	0,00	0,00	0,00	80.936.983,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**2.959.442.961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.959.442.961,00**
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	**2.959.442.961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.959.442.961,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.226.110.270,00	0,00	0,00	0,00	2.226.110.270,00
02.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	630.751.091,00	0,00	0,00	0,00	630.751.091,00
03.PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	59.920.000,00	0,00	0,00	0,00	59.920.000,00
04.PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.661.600,00	0,00	0,00	0,00	42.661.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**136.984.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.984.000,00**
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	**136.984.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.984.000,00**
01.PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00
02.PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	83.884.000,00	0,00	0,00	0,00	83.884.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**12.320.236.769,00**	**16.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.337.036.769,00**
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	**12.320.236.769,00**	**16.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.337.036.769,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.934.339.223,00	0,00	0,00	0,00	2.934.339.223,00
02.PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	13.259.700,00	0,00	0,00	0,00	13.259.700,00
03.PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	111.571.200,00	0,00	0,00	0,00	111.571.200,00
04.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	93.383.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	110.183.000,00
05.PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.602.500,00	0,00	0,00	0,00	41.602.500,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	69.943.900,00	0,00	0,00	0,00	69.943.900,00
07.PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.056.137.246,00	0,00	0,00	0,00	9.056.137.246,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**3.762.431.886,00**	**22.965.250,00**	**0,00**	**0,00**	**3.785.397.136,00**
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**3.762.431.886,00**	**22.965.250,00**	**0,00**	**0,00**	**3.785.397.136,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.179.643.959,00	22.965.250,00	0,00	0,00	3.202.609.209,00
02.PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	393.918.327,00	0,00	0,00	0,00	393.918.327,00
03.PROGRAM PENCATATAN SIPIL	145.443.800,00	0,00	0,00	0,00	145.443.800,00
04.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	43.425.800,00	0,00	0,00	0,00	43.425.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**5.354.629.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.354.629.988,00**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**5.354.629.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.354.629.988,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.550.610.578,00	0,00	0,00	0,00	2.550.610.578,00
02.PROGRAM PENATAAN DESA	211.444.703,00	0,00	0,00	0,00	211.444.703,00
03.PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	11.466.000,00	0,00	0,00	0,00	11.466.000,00
04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.079.247.864,00	0,00	0,00	0,00	2.079.247.864,00
05.PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	501.860.843,00	0,00	0,00	0,00	501.860.843,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**8.004.353.061,00**	**23.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.027.853.061,00**
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**8.004.353.061,00**	**23.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.027.853.061,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.065.359.941,00	23.500.000,00	0,00	0,00	3.088.859.941,00
02.PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.730.818.800,00	0,00	0,00	0,00	1.730.818.800,00
03.PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.675.564.318,00	0,00	0,00	0,00	1.675.564.318,00
04.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.532.610.002,00	0,00	0,00	0,00	1.532.610.002,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**2.826.193.949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.826.193.949,00**
Dinas Perhubungan	**2.826.193.949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.826.193.949,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.255.683.745,00	0,00	0,00	0,00	2.255.683.745,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	540.004.811,00	0,00	0,00	0,00	540.004.811,00
03.PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	30.505.393,00	0,00	0,00	0,00	30.505.393,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**3.831.144.589,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.852.144.589,00**
Dinas Komunikasi dan Informatika	**3.831.144.589,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.852.144.589,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.365.346.473,00	18.000.000,00	0,00	0,00	2.383.346.473,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	39.928.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	40.928.800,00
03.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.425.869.316,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.427.869.316,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**1.894.249.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.249.357,00**
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	**1.894.249.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.249.357,00**
01.PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	240.638.261,00	0,00	0,00	0,00	240.638.261,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	13.762.000,00	0,00	0,00	0,00	13.762.000,00
04.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.633.599.096,00	0,00	0,00	0,00	1.633.599.096,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**4.051.204.781,00**	**82.660.799,00**	**0,00**	**0,00**	**4.133.865.580,00**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**4.051.204.781,00**	**82.660.799,00**	**0,00**	**0,00**	**4.133.865.580,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.056.582.258,00	82.660.799,00	0,00	0,00	3.139.243.057,00
02.PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
03.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	766.570.923,00	0,00	0,00	0,00	766.570.923,00
04.PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	81.520.000,00	0,00	0,00	0,00	81.520.000,00
05.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	145.031.600,00	0,00	0,00	0,00	145.031.600,00

PENANAMAN MODAL					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**1.595.271.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.271.411,00**
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	**1.595.271.411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.271.411,00**
01.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	89.277.500,00	0,00	0,00	0,00	89.277.500,00
02.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.155.993.911,00	0,00	0,00	0,00	1.155.993.911,00
03.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**33.274.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.274.402,00**
Dinas Komunikasi dan Informatika	**33.274.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.274.402,00**
01.PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	33.274.402,00	0,00	0,00	0,00	33.274.402,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**2.106.223.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106.223.037,00**
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	**2.106.223.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.106.223.037,00**
01.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.802.718.737,00	0,00	0,00	0,00	1.802.718.737,00
02.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	141.896.100,00	0,00	0,00	0,00	141.896.100,00
03.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	161.608.200,00	0,00	0,00	0,00	161.608.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**417.424.578,00**	**153.338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**570.762.578,00**
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**417.424.578,00**	**153.338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**570.762.578,00**
01.PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	417.424.578,00	153.338.000,00	0,00	0,00	570.762.578,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**2.911.097.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.911.097.389,00**
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	**2.911.097.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.911.097.389,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.674.284.689,00	0,00	0,00	0,00	2.674.284.689,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	145.054.900,00	0,00	0,00	0,00	145.054.900,00
03.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	91.757.800,00	0,00	0,00	0,00	91.757.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**46.338.766.775,00**	**806.143.655,00**	**0,00**	**0,00**	**47.144.910.430,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**5.819.670.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.819.670.545,00**
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	**5.819.670.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.819.670.545,00**
01.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	5.247.411.965,00	0,00	0,00	0,00	5.247.411.965,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	429.431.580,00	0,00	0,00	0,00	429.431.580,00
03.PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	142.827.000,00	0,00	0,00	0,00	142.827.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**4.952.174.663,00**	**338.438.818,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290.613.481,00**
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	**4.952.174.663,00**	**338.438.818,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290.613.481,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.830.399.063,00	0,00	0,00	0,00	3.830.399.063,00
02.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	493.574.700,00	338.438.818,00	0,00	0,00	832.013.518,00
03.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	114.985.900,00	0,00	0,00	0,00	114.985.900,00
04.PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	217.418.000,00	0,00	0,00	0,00	217.418.000,00
05.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	295.797.000,00	0,00	0,00	0,00	295.797.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**30.211.899.559,00**	**341.784.837,00**	**0,00**	**0,00**	**30.553.684.396,00**
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	**20.264.837.845,00**	**42.437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.307.274.845,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.973.711.742,00	40.437.000,00	0,00	0,00	9.014.148.742,00
02.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.170.589.830,00	0,00	0,00	0,00	7.170.589.830,00
03.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.235.124.393,00	0,00	0,00	0,00	3.235.124.393,00
04.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	133.669.480,00	0,00	0,00	0,00	133.669.480,00
05.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	751.742.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	753.742.400,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	**9.947.061.714,00**	**299.347.837,00**	**0,00**	**0,00**	**10.246.409.551,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.941.617.684,00	0,00	0,00	0,00	3.941.617.684,00
02.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.788.956.145,00	0,00	0,00	0,00	2.788.956.145,00
03.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.014.475.416,00	299.347.837,00	0,00	0,00	1.313.823.253,00
04.PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.707.472.829,00	0,00	0,00	0,00	1.707.472.829,00
05.PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	9.412.800,00	0,00	0,00	0,00	9.412.800,00
06.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	485.126.840,00	0,00	0,00	0,00	485.126.840,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**3.154.312.923,00**	**75.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.230.232.923,00**
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	**3.154.312.923,00**	**75.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.230.232.923,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.205.632.821,00	75.920.000,00	0,00	0,00	2.281.552.821,00
02.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	250.615.000,00	0,00	0,00	0,00	250.615.000,00
03.PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	679.375.102,00	0,00	0,00	0,00	679.375.102,00
04.PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	18.690.000,00	0,00	0,00	0,00	18.690.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**1.917.985.745,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.967.985.745,00**
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	**1.917.985.745,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.967.985.745,00**
01.PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.807.398.744,00	50.000.000,00	0,00	0,00	1.857.398.744,00
02.PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	53.384.200,00	0,00	0,00	0,00	53.384.200,00
03.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	57.202.801,00	0,00	0,00	0,00	57.202.801,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**282.723.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.723.340,00**
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	**282.723.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.723.340,00**
01.PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	228.973.545,00	0,00	0,00	0,00	228.973.545,00
02.PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	53.749.795,00	0,00	0,00	0,00	53.749.795,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**70.663.286.219,00**	**1.681.186.748,00**	**0,00**	**0,00**	**72.344.472.967,00**
SEKRETARIAT DAERAH	**32.956.617.066,00**	**730.787.795,00**	**0,00**	**0,00**	**33.687.404.861,00**
Bagian Pemerintahan	**544.299.514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.299.514,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	211.866.283,00	0,00	0,00	0,00	211.866.283,00
02.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	332.433.231,00	0,00	0,00	0,00	332.433.231,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	**4.459.515.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.459.515.304,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	249.135.656,00	0,00	0,00	0,00	249.135.656,00
02.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.210.379.648,00	0,00	0,00	0,00	4.210.379.648,00
Bagian Hukum	**818.187.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**818.187.486,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.292.591,00	0,00	0,00	0,00	146.292.591,00
02.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	671.894.895,00	0,00	0,00	0,00	671.894.895,00
Bagian Perekonomian dan SDA	**425.660.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.660.250,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.267.000,00	0,00	0,00	0,00	129.267.000,00
02.PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	296.393.250,00	0,00	0,00	0,00	296.393.250,00
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	**434.631.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.631.180,00**

01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.502.600,00	0,00	0,00	0,00	116.502.600,00
02.PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	318.128.580,00	0,00	0,00	0,00	318.128.580,00
Bagian Umum	**16.749.624.280,00**	**730.787.795,00**	**0,00**	**0,00**	**17.480.412.075,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.749.624.280,00	730.787.795,00	0,00	0,00	17.480.412.075,00
Bagian Organisasi	**255.003.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.003.000,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	255.003.000,00	0,00	0,00	0,00	255.003.000,00
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**240.204.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.204.150,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	240.204.150,00	0,00	0,00	0,00	240.204.150,00
Bagian Administrasi Pembangunan	**355.001.841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.001.841,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.179.000,00	0,00	0,00	0,00	228.179.000,00
02.PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	126.822.841,00	0,00	0,00	0,00	126.822.841,00
Bagian Perencanaan dan Keuangan	**8.674.490.061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.674.490.061,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.674.490.061,00	0,00	0,00	0,00	8.674.490.061,00
SEKRETARIAT DPRD	**37.706.669.153,00**	**950.398.953,00**	**0,00**	**0,00**	**38.657.068.106,00**
Sekretariat DPRD	**37.706.669.153,00**	**950.398.953,00**	**0,00**	**0,00**	**38.657.068.106,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.086.794.453,00	950.398.953,00	0,00	0,00	27.037.193.406,00
02.PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.619.874.700,00	0,00	0,00	0,00	11.619.874.700,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**77.589.201.295,64**	**858.192.500,00**	**2.127.063.430,00**	**193.747.221.408,00**	**274.321.678.633,64**
PERENCANAAN	**4.932.298.375,00**	**208.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.658.375,00**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**4.932.298.375,00**	**208.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.658.375,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.239.375.913,00	208.360.000,00	0,00	0,00	3.447.735.913,00
02.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.153.919.565,00	0,00	0,00	0,00	1.153.919.565,00
03.PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	539.002.897,00	0,00	0,00	0,00	539.002.897,00
KEUANGAN	**47.116.408.657,64**	**618.331.100,00**	**2.127.063.430,00**	**193.747.221.408,00**	**243.609.024.595,64**
Badan Keuangan dan Aset Daerah	**38.645.696.812,64**	**398.206.000,00**	**2.127.063.430,00**	**193.747.221.408,00**	**234.918.187.650,64**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.138.193.905,64	73.260.000,00	0,00	0,00	21.211.453.905,64
02.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.064.020.910,00	63.874.000,00	2.127.063.430,00	193.747.221.408,00	211.002.179.748,00
03.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.443.481.997,00	261.072.000,00	0,00	0,00	2.704.553.997,00
Badan Pendapatan Daerah	**8.470.711.845,00**	**220.125.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.690.836.945,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.762.204.501,00	220.125.100,00	0,00	0,00	6.982.329.601,00
02.PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.708.507.344,00	0,00	0,00	0,00	1.708.507.344,00
KEPEGAWAIAN	**22.721.796.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.721.796.915,00**
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	**22.721.796.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.721.796.915,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.112.996.473,00	0,00	0,00	0,00	21.112.996.473,00
02.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.608.800.442,00	0,00	0,00	0,00	1.608.800.442,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**54.327.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.327.600,00**
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	**54.327.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.327.600,00**
01.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	54.327.600,00	0,00	0,00	0,00	54.327.600,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**2.764.369.748,00**	**31.501.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795.871.148,00**
Badan Riset dan Inovasi Daerah	**2.764.369.748,00**	**31.501.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795.871.148,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.740.024.069,50	31.501.400,00	0,00	0,00	1.771.525.469,50
02.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.024.345.678,50	0,00	0,00	0,00	1.024.345.678,50
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**5.565.748.390,00**	**140.998.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706.746.490,00**
INSPEKTORAT DAERAH	**5.565.748.390,00**	**140.998.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706.746.490,00**
Inspektorat	**5.565.748.390,00**	**140.998.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706.746.490,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.216.710.208,00	140.998.100,00	0,00	0,00	4.357.708.308,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.128.911.682,00	0,00	0,00	0,00	1.128.911.682,00
03.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	220.126.500,00	0,00	0,00	0,00	220.126.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	**18.569.147.514,00**	**747.577.545,00**	**0,00**	**0,00**	**19.316.725.059,00**
KECAMATAN	**18.569.147.514,00**	**747.577.545,00**	**0,00**	**0,00**	**19.316.725.059,00**
Kecamatan Komodo	**2.388.436.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.388.436.984,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.207.124.984,00	0,00	0,00	0,00	2.207.124.984,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.245.000,00	0,00	0,00	0,00	15.245.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.921.000,00	0,00	0,00	0,00	111.921.000,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.046.000,00	0,00	0,00	0,00	33.046.000,00
Kelurahan Labuan Bajo	**299.440.000,00**	**124.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**423.840.000,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	166.840.000,00	0,00	0,00	0,00	166.840.000,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	132.600.000,00	124.400.000,00	0,00	0,00	257.000.000,00
Kelurahan Wae Kelambu	**252.230.000,00**	**180.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**432.230.000,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.705.400,00	0,00	0,00	0,00	123.705.400,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	128.524.600,00	180.000.000,00	0,00	0,00	308.524.600,00
Kecamatan Boleng	**1.456.718.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456.718.021,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.373.076.021,00	0,00	0,00	0,00	1.373.076.021,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.859.000,00	0,00	0,00	0,00	12.859.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.813.000,00	0,00	0,00	0,00	16.813.000,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.770.000,00	0,00	0,00	0,00	51.770.000,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00

Kecamatan Mbeliling	**1.207.633.932,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.633.932,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.115.773.832,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1.133.773.832,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.195.000,00	0,00	0,00	0,00	4.195.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.184.800,00	0,00	0,00	0,00	7.184.800,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73.011.500,00	0,00	0,00	0,00	73.011.500,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.668.800,00	0,00	0,00	0,00	5.668.800,00
Kecamatan Sano Nggoang	**1.348.223.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.223.433,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.259.713.433,00	0,00	0,00	0,00	1.259.713.433,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.195.000,00	0,00	0,00	0,00	8.195.000,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.907.000,00	0,00	0,00	0,00	4.907.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.508.000,00	0,00	0,00	0,00	57.508.000,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240.000,00
Kecamatan Lembor	**2.458.523.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.458.523.785,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.319.969.785,00	0,00	0,00	0,00	2.319.969.785,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.530.000,00	0,00	0,00	0,00	17.530.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.810.000,00	0,00	0,00	0,00	29.810.000,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.404.000,00	0,00	0,00	0,00	74.404.000,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00
Kelurahan Tangge	**307.824.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.824.325,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.824.325,00	0,00	0,00	0,00	107.824.325,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Kecamatan Welak	**1.437.270.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437.270.148,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.269.446.648,00	0,00	0,00	0,00	1.269.446.648,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.773.300,00	0,00	0,00	0,00	20.773.300,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.884.400,00	0,00	0,00	0,00	17.884.400,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.660.000,00	0,00	0,00	0,00	11.660.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.953.800,00	0,00	0,00	0,00	102.953.800,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.552.000,00	0,00	0,00	0,00	14.552.000,00
Kecamatan Lembor Selatan	**1.222.825.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222.825.263,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.092.865.263,00	0,00	0,00	0,00	1.092.865.263,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.680.000,00	0,00	0,00	0,00	63.680.000,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.380.000,00	0,00	0,00	0,00	25.380.000,00
Kecamatan Kuwus	**1.565.223.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.565.223.770,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.479.501.770,00	0,00	0,00	0,00	1.479.501.770,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.413.000,00	0,00	0,00	0,00	13.413.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.263.000,00	0,00	0,00	0,00	7.263.000,00
04.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.278.000,00	0,00	0,00	0,00	63.278.000,00
05.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.768.000,00	0,00	0,00	0,00	1.768.000,00
Kelurahan Nantal	**155.893.000,00**	**131.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**286.893.000,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.693.000,00	0,00	0,00	0,00	85.693.000,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.200.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	201.200.000,00
Kelurahan Golo Ruu	**139.450.000,00**	**134.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**273.690.000,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.150.000,00	0,00	0,00	0,00	70.150.000,00
02.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.300.000,00	134.240.000,00	0,00	0,00	203.540.000,00
Kecamatan Macang Pacar	**986.571.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.571.076,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	795.939.676,00	0,00	0,00	0,00	795.939.676,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	31.580.000,00	0,00	0,00	0,00	31.580.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.459.500,00	0,00	0,00	0,00	37.459.500,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.985.000,00	0,00	0,00	0,00	14.985.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.164.700,00	0,00	0,00	0,00	77.164.700,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.442.200,00	0,00	0,00	0,00	29.442.200,00
Kecamatan Ndoso	**1.025.829.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.829.131,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	940.458.131,00	0,00	0,00	0,00	940.458.131,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.340.600,00	0,00	0,00	0,00	3.340.600,00

03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.374.400,00	0,00	0,00	0,00	7.374.400,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.226.300,00	0,00	0,00	0,00	4.226.300,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.503.500,00	0,00	0,00	0,00	63.503.500,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.926.200,00	0,00	0,00	0,00	6.926.200,00
Kecamatan Kuwus Barat	**1.212.973.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.973.796,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.094.106.296,00	0,00	0,00	0,00	1.094.106.296,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.878.200,00	0,00	0,00	0,00	9.878.200,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.876.200,00	0,00	0,00	0,00	26.876.200,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	6.820.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.502.400,00	0,00	0,00	0,00	70.502.400,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.790.700,00	0,00	0,00	0,00	4.790.700,00
Kecamatan Pacar	**1.104.080.850,00**	**159.937.545,00**	**0,00**	**0,00**	**1.264.018.395,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	986.744.750,00	159.937.545,00	0,00	0,00	1.146.682.295,00
02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.060.000,00	0,00	0,00	0,00	9.060.000,00
03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.009.100,00	0,00	0,00	0,00	13.009.100,00
04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00
05.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.072.000,00	0,00	0,00	0,00	84.072.000,00
06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.265.000,00	0,00	0,00	0,00	7.265.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**4.493.844.594,00**	**18.359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.512.203.594,00**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**4.493.844.594,00**	**18.359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.512.203.594,00**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**4.493.844.594,00**	**18.359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.512.203.594,00**
01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.116.652.646,00	18.359.000,00	0,00	0,00	2.135.011.646,00
02.PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	577.621.948,00	0,00	0,00	0,00	577.621.948,00
03.PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.452.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.590.000,00
04.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00
05.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	344.910.000,00	0,00	0,00	0,00	344.910.000,00
Jumlah	**920.492.459.138,66**	**92.856.197.412,00**	**2.127.063.430,00**	**193.747.221.408,00**	**1.209.222.941.388,66**

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mencatat sejumlah permasalahan strategis sebagai berikut :

1) Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2023 tercacat sebanyak 49.950 jiwa atau 16,82%. Walaupun persentase angka ini turun 0,33% dibanding 17,15% pada tahun 2022 namun jumlah penduduk miskin tahun 2022 dan tahun 2023 hampir tidak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya program Penanggulanggan Kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi Isu Strategis Provinsi NTT dan menjadi tantangan karena pemerintah pusat telah menargetkan tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 sehingga akan tetap menjadi Isu/Permasalahan Strategis di

daerah;

2) Berdasarkan publikasi data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 masih tinggi yakni 4,42% dari total angkatan kerja sebanyak 130.856 jiwa. Sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan TPT Tahun 2022, namun masih menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi NTT. Untuk itu, RKPD Tahun 2025 menekankan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM guna mendorong penciptaan tenaga kerja terampil bersertifikat kompetensi sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah;
3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 mencapai 67,84 dan masih berada di bawah capaian Provinsi NTT. Salah satu komponen pembentuk IPM yang perlu mendapatkan perhatian adalah Rata-rata Lama Sekolah yang pada Tahun 2023 mencapai 7,94 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia sekolah baru mencapai pendidikan sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP sehingga perlu penanganan khususnya pada anak-anak putus sekolah;
4) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pada Tahun 2023, Jumlah kasus kematian Ibu meningkat dari 8 kasus di tahun 2022 menjadi 10 kasus di tahun 2023. Artinya selalu meningkat dari tahun 2019. Pada tahun 2023, penyebab kematian ibu diidentifikasi paling banyak akibat perdarahan dan hipertensi. Hal ini menunjukkan masih kurangnya layanan kesehatan terutama pelayanan maternal di Kabupaten Manggarai Barat. Sementara, jumlah kasus kematian bayi mengalami peningkatan sebanyak 23 kasus dalam kurun waktu tahun 2019-2022, sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 60 kasus kematian. Ini mengindikasikan

masih dibutuhkannya penguatan kebijakan kesehatan yang berfokus pada peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak secara merata

5) Daya dukung pengembangan usaha terutama infrastruktur dan sarana prasarana pendukung belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023 baru mencapai 52,02% dari total 1.226,89 km panjang jalan kabupaten dari 185 ruas jalan yang tersebar di seluruh kecamatan. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu dipetakan dan diprioritaskan ruas-ruas strategis yang sangat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.
6) Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 baru mencapai 33,47% sehingga peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman perlu menjadi perhatian sebab ketercukupan dan kualitas air minum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di tahun 2023 mencapai 71,43% yang mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 30% rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat belum mendapatkan akses sanitasi layak.
7) Stunting juga menjadi permasalahan strategis pada tahun 2025 sebab walaupun berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat bahwa pada tahun 2023 Prevalensi Stunting tercatat sebesar 8,2%. Sedangkan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, Prevalensi Stunting Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 sebesar 31,10%. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pencegahan stunting tidak hanya berhenti pada peningkatan gizi buruk,

termasuk didalamnya penyelesaian masalah sistemik seperti akses air bersih aman, sanitasi aman, dan lingkungan bersih

8) Dalam aspek pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, secara umum dapat disimpulkan cukup baik dengan rata-rata realisasi di atas 65%. Namun, perlu diperhatikan bidang-bidang yang masih rendah realisasinya seperi bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Program Pendidikan Anak Usia Dini di bidang Pendidikan dan pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis di bidang kesehatan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:

"MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP".

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata "Bangkit" mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata "Bangkit" dimaknai sebagai berikut:
   a) **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk *"bangun dari tidurnya"* dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan

dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian

b) **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaat kansemua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi.** Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

a) **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimism untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.

b) **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan

masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.

c) **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. **Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap** menunjukkan tekad, semangat dan optimism bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan kearah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh dan Populer**.

Misi Bupati Manggarai Barat Periode 2016-2021 dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi, yaitu:

1) Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah;
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3) Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
4) Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;
5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang memiliki dimensi politik dan teknokratik dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program pembangunan daerah dalam dimensi politik berisi prioritas pembangunan dan bersifat unggulan yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dalam periode 2021-2026 pada dasarnya adalah penjabaran atas makna Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap. Makna ini diangkat dari nilai kerja keras dalam budaya orang Manggarai seperti yang tersirat dari peribahasa "**Neka Mejeng Hese, Neka Ngonde Holes**". Oleh karena itu pula, program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2021-2026 ini juga diberi nama **Program Mabar Bangkit** dan **Program Mabar Mantap**. Program pembangunan ini merupakan program lintas sektor dan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun.

Program Mabar Bangkit diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan peningkatan kualitas SDM sehingga diharapkan nantinya akan tercipta masyarakat yang unggul dan tangguh. Sedangkan Program Mabar Mantap lebih diarahkan untuk menciptakan Manggarai Barat yang maju dan populer melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Berikut uraian kedua program ini selengkapnya:

Tabel 2
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050	Urusan
1.	**Program MABAR BANGKIT**		
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		Program Pengembangan UMKM	Koperasi-Ukm
	Pertanian, peternakan dan perikanan zonasi berbasis teknologi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan Kelautan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan Kelautan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan Kelautan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian

		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian
	Beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta insentif bagi tenaga medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Non Urusan
	Perhatian khusus bagi para lansia, komitmen untuk tekan angka kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal produktif di semua sector	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja

		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
2.	**Program MABAR MANTAP**		
	Labuan Bajo smart city dan penciptaan kota-kota baru di kecamatan	Program Aplikasi Informatika	Kominfo
		Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
	Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Program Pengembangan Sdm	Pendidikan Dan Pelatihan
		Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kewilayah-Kecamatan
	Layanan publik berbasis tekologi	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kominfo
		Program Aplikasi Informatika	Kominfo

	Generasi berani wirausaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
	Pemerataan dan peningkatan kualitas semua jenis infrastruktur pelayanan masyarakat dan jalan raya	Program Pengembangan Perumahan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
	Pengelolaan air minum berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perumusan program pembangunan daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan dalam dimensi teknokratik juga membangun keterpaduan antara prioritas pembangunan yang bersifat politik dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi outcome dan impact.

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oeh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan inovatif guna mencapai apa yang menjadi cita-cita bersama tersebut. Oleh karena itu, gerakan inovasi daerah menjadi suatu keharusan. Inovasi daerah menjadi suatu kewajiban, bukan lagi suatu rutinitas belaka. Inovasi akan membantu daerah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah. Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan daerah:

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan kegiatan yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Manggarai Barat yang berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Rekapitulasi kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen tahunan dituangkan dalam tabel di bawah ini:

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
8.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
14.	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
22.	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Peningkatan Kapasitas DPRD

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Fasilitasi Tugas DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			Layanan Administrasi DPRD
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.	Badan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Mutasi dan Promosi ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29.	Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
			Pendampingan dan Asistensi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30.	Kecamatan Komodo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.	Kecamatan Boleng	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.	Kecamatan Mbeliling	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.	Kecamatan Sano Nggoang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
34.	Kecamatan Lembor	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35.	Kecamatan Welak	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.	Kecamatan Lembor Selatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37	Kecamatan Kuwus	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
38.	Kecamatan Macang Pacar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.	Kecamatan Ndoso	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
40.	Kecamatan Kuwus Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.	Kecamatan Pacar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Cakupan SPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Secara operasional, tata cara penerapannya diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengintegrasikan 29 indikator pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja). Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama akibat kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan sumber daya serta alokasi

anggaran dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, realisasi terhadap 29 indikator tersebut belum optimal. Dokumen SPM Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan capaian penerapan pelayanan dasar di Kabupaten Manggarai Barat.

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4231);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

B. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, kebijakan umum daerah dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara di tengah tantangan sumber daya Berikut adalah susunan kebijakan umum daerah tersebut:

1. Landasan Strategis dan Komitmen Daerah

   Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan pemenuhan pelayanan dasar sebagai instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada:

   a. Penyelarasan Regulasi: Mengintegrasikan target SPM nasional yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 59 Tahun 2021 ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah.

   b. Prioritas Program: Menjadikan 29 indikator pelayanan dasar sebagai prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait

2. Fokus Bidang Pelayanan Dasar

   Kebijakan umum diarahkan pada enam urusan wajib pelayanan dasar dengan strategi spesifik

   a. Pendidikan: Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta kualitas sarana prasarana sekolah

b. Kesehatan: Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, serta optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan (UKP/UKM)
c. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang: Fokus pada konektivitas jalan kabupaten, akses air bersih (Sistem Penyediaan Air Minum), dan pengembangan sistem drainase untuk mitigasi banjir.
d. Perumahan Rakyat: Penanganan kawasan permukiman kumuh dan penyediaan infrastruktur dasar bagi hunian layak.
e. Ketentraman & Ketertiban Umum: Penguatan perlindungan masyarakat melalui peningkatan waktu tanggap (*response time*) pemadam kebakaran dan mitigasi risiko bencana daerah.
f. Sosial: Optimalisasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.

3. Strategi Operasional dan Anggaran

Mengingat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal, kebijakan umum daerah menekankan pada:

a. Sinkronisasi Pusat-Daerah: Mengupayakan keselarasan anggaran antara dana transfer pusat dengan prioritas kegiatan pelayanan dasar di daerah agar 29 indikator dapat terealisasi optimal.
b. Penguatan Tata Kelola: Mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan Nilai SAKIP dan Opini WTP sebagai pondasi layanan publik yang prima.
c. Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi SPM melalui mekanisme e-planning untuk menjamin ketepatan sasaran di setiap tahun anggaran.

4. Integrasi Lintas Sektor

Kebijakan ini juga menghubungkan pencapaian SPM dengan isu strategis daerah lainnya, seperti:

a. Pariwisata Berkelanjutan: Memastikan infrastruktur dasar di kawasan wisata juga memberikan manfaat langsung bagi pelayanan dasar masyarakat lokal.

b. SDM Berkualitas: Menempatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan utama dari pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

C. Orientasi dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM yang di Tuangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Berdasarkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Manggarai Barat, orientasi dan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) digambarkan sebagai berikut:

1. Orientasi Strategis: Responsif dan Terarah

   Pemerintah daerah mengorientasikan kebijakan anggaran tahun 2025 untuk tetap konsisten dengan rencana pembangunan tahunan daerah meskipun terdapat dinamika fiskal. Orientasi ini mencakup:

   a. Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional: Melakukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodir efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
   b. Fokus pada Layanan Dasar: Menempatkan pemenuhan akses layanan dasar sebagai bagian dari kebijakan infrastruktur strategis, termasuk wajib belajar 13 tahun, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta akses air minum dan sanitasi.
   c. Pemanfaatan Data Makro: Menggunakan kerangka ekonomi makro daerah sebagai dasar untuk menjamin bahwa belanja daerah tetap mampu membiayai indikator-indikator SPM di tengah perubahan asumsi ekonomi.

2. Komitmen Yuridis dan Operasional

   Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan komitmen kuat melalui:

   a. Kepatuhan Regulasi SPM: Menjadikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 59 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama dalam penyusunan perubahan kebijakan anggaran

b. Integrasi Penganggaran: Berkomitmen untuk menyusun kebijakan belanja daerah yang tidak hanya merespon keadaan darurat, tetapi juga memastikan ketersediaan anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar.

c. Transparansi dan Akuntabilitas: Mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan setiap rupiah yang dianggarkan berkontribusi nyata pada pencapaian target SPM.

3. Komitmen Pendanaan yang Ditentukan (Ear-marked)

   Dalam kebijakan anggaran ini, terdapat komitmen khusus terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*ear-marked*), yang diarahkan untuk mendukung kinerja daerah di bidang pelayanan dasar sesuai standar teknis kementerian terkait.

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro.

Secara keseluruhan, kinerja makro periode ini menunjukkan tren **positif dan stabil**. Pembangunan tidak hanya terfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah indikator kinerja makro Kabupaten Manggarai Barat:

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,68	69,20	0,76
2.	Persentase Penduduk Miskin	16,74	16,09	-3,88
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,47	3,32	-4,32
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,93	5,82	18,05
5.	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	8.195	8.351	1,90
6.	Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)*	0,324	0,317	-2,160

Sumber Data BPS Kabupaten Manggarai Barat

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tahun anggaran ini difokuskan pada penguatan tata kelola birokrasi yang adaptif serta peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif. Melalui sinergi antarperangkat daerah, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan setiap program kerja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci.

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capain Kinerja			Sumber Data
1.	**Pendidikan**	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini / Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	X 100%	61,73%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar / Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	X 100%	97,89%	
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	X 100%	68,67%	
		Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik / Jumlah Seluruh Toilet	X 100%	38,51%	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik / Jumlah Ruang Kelas	X 100%	32,93%	

2.	**Kesehatan**	Persentase Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu Tahun N / Jumlah Ibu Melahirkan Tahun N	X 100%	0,17%	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Jumlah balita umur 0-59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu / Jumlah balita umur 0-59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	X 100%	11,27%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	80,17%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	95,26%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	96,72%	

		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1+ jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 / Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	X 100%	100%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	X 100%	70,59%	
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	X 100%	87,14%	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	83,95%	

		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	65,54%	Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	91,36%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	99,90%	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	X 100%	96,93%	

3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (Ha) / Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	X 100%	17,99%	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) / Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	X 100%	48,84%	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N / Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota	X 100%	7,14%	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik / Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	X 100%	67,55%	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha) / Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)	X 100%	0,15%	
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) / Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	X 100%	0,20%	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya / Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	X 100%	100%	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan / Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk	X 100%	0,00%	
		Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota	X 100%	100%	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun / Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun	X 100%	0,00%	
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N / Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	X 100%	40,00%	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N / Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	X 100%	0,00%	

		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N / Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N	X 100%	0,31%	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N / Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	X 100%	0,00%	
5.	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N / Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3	X 100%	33,33%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan	X 100%	100%	Polisi Pamong Praja
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	X 100%	14,29%	Polisi Pamong Praja
		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	X 100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	X 100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap / Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	X 100%	78,26%	Pemadam Kebakaran/Polisi Pamong Praja
6.	**Sosial**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	X 100%	26,55%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	X 100%	39,02%	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	X 100%	7,56%	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	X 100%	100%	
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	X 100%	100%	
		Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	X 100%	3,16%	

7.	**Tenaga Kerja**	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah / Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di Kabupaten/Kota	X 100%	28,57%	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan	X 100%	6,75 %	
		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	X 100%	100%	
8.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	X 100%	100%	Dinas PP dan PA
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	X 100%	100%	
9.	**Pangan**	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota / Target Jumlah Cadangan Pangan	X 100%	41,08%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10.	**Pertanahan**	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah / Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah	X 100%	9,95%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting / Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	X 100%	0%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal / Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	X 100%	20,00%	
11.	**Lingkungan Hidup**	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota / Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	X 100%	78,38%	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota / Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	X 100%	57,16%	

12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	X 100%	90,35%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Anak yang Memiliki KIA / Jumlah anak wajib KIA	X 100%	100%	
		Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan / 2 (Dua) Dokumen	X 100%	100%	
		Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik / Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas	X 100%	98,33%	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	X 100%	100%	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	X 100%	100%	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	X 100%	100%	
13.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun N)	X 100%	59,18%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun / Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	X 100%	3,92%	
		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku / Jumlah kerja sama desa yang ditangani	X 100%	28,66%	

14.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR Kab/Kota Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang bersangkutan	X 100%	86,27%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	Total peserta KB Aktif Modern Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun	X 100%	56,60%	
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan	X 100%	39,68%	
15.	**Perhubungan**	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) - KTD = Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (weight) Konektivitas Transportasi Darat (ditentukan daerah, dengan satuan %) - KTL = Konektivitas Transportasi Laut - WTL = Bobot (weight) Konektivitas Transportasi Laut (ditentukan daerah, dengan satuan %) **Keterangan :** 1. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. 2. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).		0,65	Dinas Perhubungan
		Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	V/C *ratio di jalan* Kabupaten/Kota		0,37	
		Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	X 100%	100%	

16.	**Komunikasi dan Informatika**	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah	X 100%	97,67%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	X 100%	85,71%	
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota Jumlah penduduk	X 100%	85,20%	
17.	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan **-** Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	X 100%	16,97%	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
		Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	Σ Usa mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Σ Usaha Mikro	X 100%	12,94%	
18.	**Penanaman Modal**	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah nilai Investasi tahun N-1 di Kab/Kota Jumlah Niali Investasi Tahun N-1 di Kab/Kota	X 100%	102,47%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Total realisasi investasi kab/kota Target investasi Kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kab/kota yang bersangkutan	X 100%	196,16%	
19.	**Kepemudaan dan Olahraga**	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota	X 100%	100%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kab/kota	X 100%	0,17%	

		Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi / Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	X 100%	20,00%	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet peraih medali / Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	X 100%	50,00%	
20.	**Statistik**	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah / Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	X 100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	**Persandian**	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi / Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	X 100%	2,94%	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	**Kebudayaan**	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan / Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	X 100%	100%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	Jumlah Kinjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1 / Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1	X 100%	-47,72%	
23.	**Perpustakaan**	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	**Perhitungan :** **TKM :** {(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca)} x 100		62,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	**Penghitungan** : **IPM :** {(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)} x 100		2,49	

24.	**Kearsipan**	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	T = (a + i + s + j)/4 T : Tingkat Ketersediaan Arsip a : Persentase Arsip Aktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip i : Persentase Arsip Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip s : Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik j : Persentase Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN **Keterangan Perhitungan:** Tingkat ketersediaan arsip merupakan akumulasi dari seluruh perangkat daerah	80,76%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25.	**Kelautan dan Perikanan**	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton) / Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) X 100%	116,97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Angka Konsumsi Ikan	$Angka_{KI} = Angka_{KRT} + Angka_{KLRT} + Angka_{KTT}$ **Keterangan:** $Angka_{KI}$: *Angka Konsumsi Ikan* $Angka_{KRT}$: *Angka Konsumsi Rumah Tangga* $Angka_{KLRT}$: *Angka Konsumsi Luar Rumah Tangga* $Angka_{KTT}$: *Angka Konsumsi Tidak Tercatat*	20,8 Kg	
26.	**Pariwisata**	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) / Realisasi Investasi tahun N X 100%	86,50%	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1 / Jumlah wisatawan asing tahun N-1 X 100%	44,52%	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun N – Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1 / Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1 X 100%	-16,80%	

27.	**Pertanian**	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 / Produksi tanaman pangan tahun N-1	X 100%	-11,83%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan
		Persentase peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 / Produksi hortikultura tahun N-1	X 100%	-18,45%	
		Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1 / Produksi komoditas peternakan tahun N-1	X 100%	-88,65%	
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini / Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	X 100%	5,71%	
28.	**Perdagangan**	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku / Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	X 100%	23,44%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
29.	**Perindustrian**	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: • Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% • Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% • Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% • Dan seterusnya.		0,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

			2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% • Dan seterusnya. 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% • Dan seterusnya 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% • Dan seterusnya. 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% • Dan seterusnya.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

			Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional / Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	X 100%	3,80%	
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industry kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 / Jumlah industry kecil dan menengah tahun N-1	X 100%	11,62%	
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Jumlah investasi sektor industri / Total investasi seluruh sektor	X 100%	0,61%	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capain Kinerja			Sumber Data
1.	**Perencanaan**	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan / Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	X 100%	94,12%	Bappeda
2.	**Keuangan**	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) / Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	X 100%	32,96%	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Realisasi Pendapatan Daerah	X 100%	21,79%	

		Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N / Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	X 100%	91,15%	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	X 100%	23,28%	
3.	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	X 100%	82,69%	BKPSDMD
4.	**Penelitian dan Pengembangan**	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah / Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	X 100%	100%	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.	**Pengawasan**	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: 1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; 2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; 3. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; 4. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan 5. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.		3,020	Inspektorat
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:		2,16	

			a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 2; b. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; c. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan d. Dievaluasi - dengan hasil level 3, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.	Inspektorat
		Manajemen Risiko Indeks	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; b. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; c. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; d. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan 2,830 e. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks.	Inspektorat
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1 / Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1 X 100% 83,90%	
6.	**Pengadaan**	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan 22,94	
		Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa 0	

7.	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat Waktu; dan 2. Tidak Tepat Waktu.		Tepat Waktu	BKAD
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	X 100%	44,44%	Bagian Hukum Setda
8.	**Pelayanan Publik**	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik		89,62	Bagian Organisasi Setda

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Merujuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Pengukuran kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- indikator positif, apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja		=	Realisasi	X	100%
			Target		

❖ indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Target – (Realisasi - Target) / Target	X	100%

atau

Capaian Indikator Kinerja	=	(2x Target) - Realisasi / Target	X	100%

2.3.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Matriks Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*	*5*
Meningkatnya daya saing pariwisata secara inklusif dan berkelanjutan		1	Indeks Pariwisata Inklusif	Indeks	68,4
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,98
		3	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,09
		4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	28
Meningkatnya daya saing ekonomi yang berkeadilan		5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15
		7	Indeks Gini *	Indeks	0,319
		8	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	17,02
	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	86
Meningkatnya SDM yang		10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,97

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	*2*	*3*		*4*	*5*
berkualitas dan sejahtera		11	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,5
	Menurunnya pengangguran	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,1
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13	Prevalensi Stunting	Persen	30
Tata Kelola pemerintahan yang semakin berkualitas		14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	15	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan	Persen	18,57

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja Tahun 2025.

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran digunakan alat bantu berupa skala ordinal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja
1	*2*	*3*
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 2.3.3
Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%Capaian terhadap target 2025	Predikat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Indeks	68,4	65,28	95,44	Sangat Tinggi

2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,98	77,00	97,49	Sangat Tinggi
3	Indeks Risiko Bencana *	Indeks	123,09	188,82	46,60	Sangat Rendah
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	28,00	16,28	58,14	Rendah
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50	3,52	100,57	Sangat Tinggi
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	5,82	113,01	Sangat Tinggi
7	Indeks Gini *	Indeks	0,319	0,324**	98,43	Sangat Tinggi
8	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	17,02	17,758	104,34	Sangat Tinggi
9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	86,00	85,86	99,84**	Sangat Tinggi
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,97	69,20	98,90	Sangat Tinggi
11	Tingkat Kemiskinan *	Persen	16,5	16,09	102,48	Sangat Tinggi
12	Tingkat Pengangguran Terbuka *	Persen	3,1	3,32	92,90	Sangat Tinggi
13	Prevalensi Stunting *	Persen	30,00	31,1**	96,33	Sangat Tinggi
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00	68,91	98,44	Sangat Tinggi
15	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan	Persen	18,57	21,79	117,34	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat
** Indikator Negatif*
*** Menggunakan data realisasi tahun 2024*

Hasil pengukuran menunjukan terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama predikat sangat tinggi, 1 (satu) indikator kinerja utama predikat rendah, 1 (satu) indikator kinerja utama sangat rendah dan 3 (tiga) indikator mengacu data realisasi tahun 2024, karena belum dirilis oleh lembaga terkait.

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian pada Tahun Sebelumnya

Perhitungan selisih kinerja adalah proses membandingkan kinerja antara tahun 2025 dan tahun 2024. Selisih ini memberikan informasi penting tentang seberapa baik suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Analisis

selisih bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab selisih dan dampaknya. Dengan melakukan perhitungan dan analisis selisih kinerja secara teratur, organisasi dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan membuat keputusan yang lebih baik.

Untuk indikator positif, rumus selisih kinerja Tahun Berjalan dengan tahun lalu, Selisih Kinerja = Nilai Tahun Berjalan−Nilai Tahun Lalu. Untuk indikator negatif, rumus menghitung selisih kinerja dengan tahun lalu biasanya dibalik logikanya dibanding indikator positif, Selisih Kinerja = Nilai Tahun Lalu−Nilai Tahun Berjalan

Tabel 2.3.3
Matriks Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi				Selisih Kinerja (Peningkatan / Penurunan Kinerja)
				2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Indeks	77,00	58,20	61,6	63,95	65,28	1,33
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,83	70,74	70,81	74,89	77,00	2,11
3	Indeks Risiko Bencana *	Indeks	90,70	151,62	138,93	129,57	188,82	-59,25
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	38,00	n/a	n/a	26,1	16,28	-9,82
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00	n/a	n/a	3,45	3,52	0,07
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,15	4,12	4,77	4,93	5,82	0,89
7	Indeks Gini *	Indeks	0,3035	0,34	0,306	0,324	0,324 **	0
8	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	22,25	14,621	15,710	16,629	17,758	1,129
9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	91,00	n/a	n/a	85,86	85,86 **	0
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,49	66,95	67,84	68,68	69,20	0,52
11	Tingkat Kemiskinan *	Persen	15,25	17,15	16,82	16,74	16,09	0,65
12	Tingkat Pengangguran Terbuka *	Persen	2,96	4,91	4,42	3,47	3,32	0,15
13	Prevalensi Stunting * **	Persen	25,00	n/a	n/a	31,1	31,1 **	0
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,00	53,79	64,59	69,19	68,91	-0,28
15	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan	Persen	28,34	19,74	16,98	19,74	21,79	2,05

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

2.3.4 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD 2026.

Dalam konteks RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target akhir yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai sasaran pembangunan yang direncanakan. Untuk indikator negatif, capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD dihitung dengan membalik logika indikator positif.

Capaian Kinerja (%)=Target Akhir RPJMD/Realisasi Tahun Berjalan×100%

Pengukuran capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual (capaian kinerja pada tahun berjalan) dengan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD untuk akhir periode perencanaan.

Persentase Capaian=Realisasi Tahun Berjalan/Target Akhir RPJMD×100%

Tabel 2.3.4
Matriks Perbandingan Realisasi 2025 terhadap target akhir RPJMD 2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2030	Realisasi 2025	%Capaian terhadap target akhir RPJMD 2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Indeks	77	65,28	84,78
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,83	77	96,45
3	Indeks Risiko Bencana *	Indeks	90,7	188,82	48,04
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	38	16,28	42,84
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00	3,52	88,00
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,15	5,82	94,63
7	Indeks Gini *	Indeks	0,3035	0,324 **	93,67
8	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	22,25	17,758	79,81
9	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	91	85,86 **	94,35
10	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,49	69,2	95,46
11	Tingkat Kemiskinan *	Persen	15,25	16,09	94,78

12	Tingkat Pengangguran Terbuka *	Persen	2,96	3,32	89,16
13	Prevalensi Stunting *	Persen	25	31,1 **	80,39
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	68,91	91,88
15	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan	Persen	28,34	21,7	76,57

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

2.3.5 Analisis capaian kinerja.

Berikut analisis realisasi dan capaian perjanjian kinerja perubahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berkut :

1. Indeks Pariwisata Inklusif

Pariwisata Inklusif merupakan Pendekatan pariwisata yang memastikan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, memiliki akses, partisipasi dan keterlibatan, serta manfaat, yang setara baik dalam pengembangan pariwisata baik sebagai pelaku, penerima manfaat maupun pengambil keputusan. Indeks inklusivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inklusivitas pariwisata Manggarai Barat, yaitu sejauh mana sektor pariwisata memberikan akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Penilaian ini mencakup aspek destinasi, akomodasi, serta unsur pendukung pariwisata, dan dilihat melalui empat dimensi utama: infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Kajian indeks pariwisata inklusif Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan dengan maksud mendapatkan suatu gambaran mengenai tingkat inklusivitas pada pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat serta untuk mengetahui tingkat inklusifitas sektor pariwisata berdasarkan 4 aspek, 1) aspek sosial; 2) aspek ekonomi; 3) aspek lingkungan; dan 4) aspek infrastruktur.

Hasil kajian Indeks Pariwisata Inklusif Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.5
Laporan Akhir kajian IPI berkelanjutan Tahun 2025

Faktor	Sub Faktor	Total Bobot	Bobot Setiap Aspek				Total Bobot (Hasil)
			Aspek Infrastruktur	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial Budaya	Aspek Lingkungan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Destinasi Inklusif	Destinasi Darat	40%	3,52	3,40	1,90	1,20	24,96
	Destinasi Laut		2,70	3,60	1,10	1,80	
	Atraksi (Event)		1,24	1,90	1,40	1,20	
Akomodasi Inklusif	Hotel	40%	2,32	1,73	1,20	1,28	26,03
	Restoran/ Café		1,75	1,73	1,13	1,10	
	Pasar		0,62	0,60	0,60	0,30	
	Travel Agent		1,15	0,67	0,35	0,60	
	Fasilitas Kesehatan		0,80	0,93	0,73	0,56	
	Bandara/Pelabuhan		0,80	0,93	0,60	0,60	
	Bank dan Money Charger		0,78	0,90	0,67	0,60	
Regulasi Inklusif	Perda dan Perbup	20%	14,29				14,29
Total		100					65,28

Sumber : Laporan.pengukuran IPI Kab.Manggarai Barat Tahun 2025

Tabel analisis hasil inklusifitas memberikan gambaran mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inklusivitas dalam sektor pariwisata antara lain :

- Destinasi inklusif, bobot total mencapai 24,96 dengan aspek infrastruktur menjadi elemen kunci dalam menciptakan aksesibilitas untuk semua kalangan. Untuk destinasi laut, meskipun terdapat perhatian pada aspek social budaya dan lingkungan, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal aksesibilitas dan dampak ekonomi, sehingga destinasi ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

- Akomodasi inklusif dan pendukung pariwisata mendapatkan nilai bobot sebesar 26,03 menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran signifikan dalam menciptakan pengalaman wisata yang inklusif.
- Regulasi inklusif dengan bobot 14,39 menunjukkan komitmen yang cukup baik dengan adanya Perda, rencana induk pariwisata, serta kerja sama antara pemerintah, industri, dan NGO. Meski demikian, implementasi regulasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan penyandang disabilitas, dan pengelolaan dampak lingkungan perlu diperkuat agar prinsip inklusivitas dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor pariwisata.
- Secara keseluruhan, indeks inklusivitas pariwisata di Labuan Bajo mencapai 65,28 dari total bobot, menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan pariwisata inklusif. Pencapaian ini menandakan bahwa aspek ekonomi dan sosial budaya telah relatif baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan pada aspek lingkungan, infrastruktur lunak, serta keterlibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu melakukan intervensi strategis untuk memperkuat aspek-aspek tersebut agar pariwisata Labuan Bajo dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak.

Indeks Pariwisata Inklusif Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Laporan Akhir kajian IPI berkelanjutan Tahun 2025 realisasi 65,28 dari target 68,4 dengan tingkat capaian 94,44% , predikat ***sangat tinggi.*** Indeks Pariwisata Inklusif Kabupaten Manggarai Barat menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan realisasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel (2.3.3), sedangkan realisasi tahun 2025 65,28 terhadap target akhir RPJMD tahun 2030 77,00 dengan tingkat capaian 84,78% predikat ***tinggi.***

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dengan menggunakan metode pemetaan (plotting) konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub-indeks, sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025. Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dengan menghitung rata-rata tahunan konsentrasi NO_2, SO_2, dan PM2.5 untuk kabupaten/kota sehingga menghasilkan konsentrasi rata-rata tahunan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025.

Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan sebagai IKTL dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025. Namun demikian, Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki ekosistem gambut, sehingga nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) atau faktor koreksi gambut dalam perhitungan IKL ditetapkan sama dengan nol. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dianggap dapat mewakili suatu kondisi lingkungan karena mewakili setidaknya 3 parameter suatu wilayah yaitu air,udara dan lahan.

Tabel 2.3.6
Klasifikasi Rentang Nilai IKLH dan Kondisi Lingkungan

No.	Rentang nilai IKLH	Predikat
1	85 < x ≤ 100	Baik
2	60 < x ≤ 85	Sedang
3	0 < x ≤ 60	Kurang

Sumber : Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan, rumusan IKLH adalah sebagai berikut

IKLH Kabupaten = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

= (0.376 x 70,21) + (0.405 x 82,41) + (0.219 x 78,63)

= 77,00

Tabel 2.3.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.Manggarai Barat Tahun 2025

Indikator	Indeks	Kategori
1	*2*	*3*
Indeks Kualitas Air	70,21	Sedang
Indeks Kualitas Udara	82,41	Sedang
Indeks Kualitas Lahan	78,63	Sedang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**77,00**	**Sedang**

Sumber: SITALA KLHK Modul Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2025)

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 menunjukkan nilai indeks pada masing-masing komponen penyusun IKLH Sebagai berikut:
   a. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 70,21, termasuk dalam kategori SEDANG, yang menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Manggarai Barat telah mengalami tekanan pencemaran, terutama akibat aktivitas domestik, pertanian, dan peternakan;
   b. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 82,41, termasuk dalam kategori SEDANG, yang mengindikasikan bahwa kualitas udara ambien secara umum masih memenuhi baku mutu nasional dengan tekanan pencemaran yang relatif rendah dan bersifat lokal;
   c. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 78,63, termasuk dalam kategori SEDANG, yang mencerminkan bahwa kondisi tutupan lahan dan ruang terbuka hijau masih relatif mampu mempertahankan fungsi ekologis wilayah.
2. Berdasarkan penggabungan ketiga komponen tersebut, diperoleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 sebesar 78,89, yang berada dalam kategori SEDANG. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan hidup secara umum masih memadai dalam mendukung fungsi kehidupan, namun telah menghadapi tekanan.

Nilai IKLH Manggarai Barat 2025 = 77,00 membawa sejumlah dampak nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor pembangunan. Berikut penjelasannya:

- Dampak terhadap lingkungan
  - Menunjukkan bahwa kualitas udara, air, dan tutupan lahan relatif terjaga, sehingga ekosistem masih mendukung kehidupan.
  - Risiko kerusakan lingkungan tetap ada, terutama dari aktivitas pariwisata, pembangunan, dan alih fungsi lahan.
- Dampak terhadap kesehatan masyarakat
  - Lingkungan dengan kualitas cukup baik mengurangi potensi penyakit akibat polusi udara dan air.
  - Masyarakat lebih terlindungi dari paparan pencemaran yang bisa memicu gangguan pernapasan atau penyakit kulit
- Dampak terhadap ekonomi dan pariwisata
  - Manggarai Barat, dengan destinasi unggulan seperti Labuan Bajo dan Komodo, diuntungkan karena kualitas lingkungan yang baik meningkatkan daya tarik wisata.
  - Nilai IKLH yang tinggi dapat menjadi "branding" daerah sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sampai dengan 2025, terlihat pada tabel (2.3.3) Berikut perbandingan realisasi antar Kabupaten dan Provinsi tahun 2025

Tabel 2.3.8
Perbandingan antar Kabupaten/Provinsi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025		
		Kab.Manggarai Barat	Kab.Manggarai	Prov.NTT
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,00	80,05	75,00

Sumber: Data diolah dan dihimpun dari lemabga/instansi terkait tahun 2026

3. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan tiga komponen utama :

- Bahaya (Hazard): tingkat ancaman bencana yang mungkin terjadi, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau letusan gunung berapi.
- Kerentanan (Vulnerability): kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang membuat masyarakat lebih rentan terhadap dampak bencana. Misalnya kepadatan penduduk, kualitas bangunan, atau tingkat kemiskinan.
- Kapasitas (Capacity): kemampuan suatu wilayah atau masyarakat untuk menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana. Ini mencakup kesiapan pemerintah, infrastruktur, serta kesadaran masyarakat

Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. BNPB melalui platform InaRISK menetapkan interval penilaian sebagai berikut:

- Rendah: < 13
- Sedang: 13 – 144
- Tinggi: > 144

Hasil pengukuran diterbitkan oleh BNPB, nilai IRB Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 sebesar 188,82 dari target 123,09 tingkat capaian 46,60 % predikat **sangat rendah**. Skor Indeks Risiko Bencana (IRBI) 188,82 menunjukan wilayah Kabupaten Manggarai Barat termasuk dalam kategori risiko tinggi. Karena angka 188,82 berada di atas ambang 144, maka wilayah dengan skor tersebut memiliki potensi

ancaman bencana yang besar, tingkat kerentanan tinggi, dan kapasitas penanggulangan yang relatif rendah.

Dampak Nyata Skor IRB 188,82:

- Kerentanan masyarakat meningkat: Risiko tinggi berarti masyarakat lebih rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan.
- Gangguan ekonomi dan pariwisata: Manggarai Barat sebagai destinasi wisata unggulan (Labuan Bajo, Komodo) bisa terdampak jika bencana mengganggu akses transportasi, infrastruktur, dan kenyamanan wisatawan.
- Tekanan terhadap infrastruktur: Jalan, jembatan, dan fasilitas publik berisiko rusak, sehingga menghambat mobilitas dan pelayanan dasar.
- Ancaman terhadap lingkungan hidup: Bencana dapat mempercepat degradasi ekosistem, misalnya longsor yang merusak hutan atau banjir yang mencemari sumber air.
- Kesehatan masyarakat: Bencana meningkatkan risiko penyakit menular, trauma, dan masalah kesehatan akibat keterbatasan layanan darurat.

Rencana aksi tindaklanjut :

a. Pencegahan dan Mitigasi
   - Pemetaan wilayah rawan bencana secara detail.
   - Rehabilitasi hutan dan daerah tangkapan air untuk mengurangi longsor dan banjir.
   - Pembangunan infrastruktur tahan bencana (jalan, jembatan, rumah).

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
   - Edukasi dan simulasi evakuasi bencana di sekolah dan desa.
   - Pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana.
   - Pelatihan relawan lokal untuk penanganan darurat.

c. Sistem Peringatan Dini
   - Pengembangan sistem informasi cuaca dan geologi yang mudah diakses masyarakat.
   - Pemasangan sirene atau aplikasi peringatan dini di daerah rawan.

d. Koordinasi Pemerintah dan Stakeholder
   - Integrasi program penanggulangan bencana dengan pembangunan daerah.
   - Kolaborasi dengan BNPB, BMKG, dan lembaga internasional untuk dukungan teknis dan pendanaan

e. Pemulihan Pasca Bencana
   - Penyediaan dana cadangan daerah untuk tanggap darurat.
   - Program rehabilitasi sosial-ekonomi bagi korban bencana.
   - Restorasi ekosistem yang rusak akibat bencana

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025 Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024,

tabel 2.3.9
Perbandingan Nilai IKD dan IRB Kabupaten/Kota di Prov. NTT Tahun 2025

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
1	*2*	*3*
Alor	0,36	196,26
Belu	0,43	190,44
Ende	0,39	205,71
Flores Timur	0,54	200,85
Kota Kupang	0,41	187,54
Kupang	0,39	215,8
Lembata	0,51	205,27
Malaka	0,29	233,07
Manggarai	0,34	241,9
Manggarai Barat	0,53	188,82
Manggarai Timur	0,46	172,94
Nagekeo	0,49	206,64
Ngada	0,34	240,26

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
1	*2*	*3*
Rote Ndao	0,4	188,14
Sabu Raijua	0,38	198,05
Sikka	0,55	180,09
Sumba Barat	0,44	193,31
Sumba Barat Daya	0,29	220,46
Sumba Tengah	0,38	197,58
Sumba Timur	0,5	174,64
Timor Tengah Selatan	0,34	111,6
Timor Tengah Utara	0,44	194,02
Provinsi Nusa Tenggara Timur	**0,42**	**197,43**

Sumber: BNPB Tahun 2025

4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah adalah indikator yang mengukur capaian pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, baik dari sisi pengurangan (reduce, reuse, recycle) maupun penanganan (pengangkutan, pemrosesan, pemusnahan). Tujuannya Memberikan gambaran kuantitatif tentang keberhasilan daerah dalam mengelola sampah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan dan perencanaan program lingkungan

Komponen Penilaian IKPS:

1. Pengurangan Sampah
    - Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
    - Edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah.
    - Penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi timbulan
2. Penanganan Sampah
    - Pengangkutan sampah dari sumber ke TPS/TPA.
    - Pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
    - Pemanfaatan sampah menjadi energi atau kompos
3. Kinerja Infrastruktur
    - Ketersediaan fasilitas pengolahan (bank sampah, TPS 3R, TPA sanitary landfill).
    - Efisiensi sistem pengangkutan dan distribusi

Berikut hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah kabupaten//Provinsi NTT tahun 2025 :

Gambar 2.3.1
Perbandingan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
di Prov. NTT Tahun 2025

Nilai Kinerja Pengelolaan Sampah

Nilai	Lokasi	Status TPA	Nilai Anggaran dan Kebijakan	Nilai SDM & Fasilitas	Nilai Capaian Kinerja	Nilai Adipura Sementara
1	Kabupaten Alor	Open Dumping	3.78	13.5	9.22	26.5
2	Kabupaten Belu	Open Dumping	4.44	18.94	13.05	36.44
3	Kabupaten Ende	Open Dumping	12.11	17.31	8.92	38.34
4	Kabupaten Flores Timur	Open Dumping	6.11	16.75	14.93	37.79
5	Kabupaten Kupang	Tidak memiliki TPA	3.78	15.36	6.67	25.81
6	Kabupaten Lembata	Controlled Landfill	4.44	14.64	15.29	34.37
7	Kabupaten Malaka	Open Dumping	1.78	13.58	8.73	24.1
8	Kabupaten Manggarai	Open Dumping	6.33	12.75	6.85	25.93
9	Kabupaten Manggarai Barat	Open Dumping	13.89	14.72	16.28	44.89
10	Kabupaten Manggarai Timur	Controlled Landfill	2.44	14.31	26.96	43.71
11	Kabupaten Nagekeo	Tidak memiliki TPA	4.44	14.14	8.59	27.18

Sumber : Laporan pendamppingan TPA Provinsi NTT

Gambar 2.3.2
Komponen Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025



Sumber : Laporan pendamppingan TPA Provinsi NTT

Dari gambar diatas dapat disimpulkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 realisasi 16,28 dari target 28,00 dengan tingkat capaian 58,14 % predikat **sangat rendah**.

Nilai IKPS Rendah (<50) menunjukan pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat masih jauh dari memadai. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengurangan sampah minim: Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan efektif, masyarakat jarang memilah sampah dari sumber.
- Penanganan terbatas: Banyak sampah tidak terangkut ke TPS/TPA atau masih dibuang sembarangan.
- Infrastruktur kurang: Fasilitas seperti bank sampah, TPS 3R, atau TPA sanitary landfill belum tersedia atau tidak berfungsi optimal.
- Risiko pencemaran tinggi: Timbulan sampah menumpuk, menimbulkan bau, pencemaran air, dan potensi penyakit.

Dampak Nyata Nilai IKPS Rendah (<50) adalah sebagai berikut :

- Lingkungan: Sungai dan laut tercemar, kualitas udara menurun akibat pembakaran sampah terbuka.
- Kesehatan: Meningkatnya penyakit berbasis lingkungan (diare, ISPA, demam berdarah).
- Sosial-ekonomi: Menurunkan kualitas hidup masyarakat dan citra daerah, serta menambah biaya penanganan darurat.

Langkah Perbaikan adalah sebagai berikut :

- Edukasi masyarakat: Mendorong pemilahan sampah sejak rumah tangga.
- Penguatan kelembagaan: Pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem pengangkutan dan pengolahan.
- Infrastruktur: Membangun atau memperbaiki TPA dengan sistem sanitary landfill, memperbanyak bank sampah.
- Kolaborasi: Melibatkan komunitas, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

5. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai tingkat daya saing pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yang pada hakikatnya mencerminkan tingkat produktivitas daerah. Tujuannya adalah memberikan gambaran posisi suatu daerah dalam hal produktivitas, inovasi, dan kualitas pembangunan, sehingga bisa menjadi dasar perencanaan kebijakan daerah

IDSD 2025 disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Struktur kerangka ini secara umum masih mempertahankan pendekatan yang digunakan pada IDSD 2024. Setiap pilar daya saing diukur melalui serangkaian indikator yang berfungsi sebagai pembentuk indeks. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam sejumlah dimensi yang bersifat konseptual semata dan tidak digunakan secara langsung dalam proses penghitungan indeks.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, hubungan antara komponen, pilar, dimensi, dan indikator dalam IDSD 2025 ditampilkan pada ilustrasi pada gambar berikut.

Gambar 3.2.3
Komponen IDSD Tahun 2025



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional 2025

Gambar 3.2.4
Perbandingan skor IDSD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2025

NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,30	3,37	3,85	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	3,50
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	4,55	3,67	3,36	4,19	3,58	3,83	4,88	2,04	2,26	4,12	2,26	3,04	3,39
RATA-RATA KAB/KOTA	4,52	2,78	4,21	4,01	3,51	4,16	3,25	2,71	2,33	3,53	2,61	2,42	3,35
SUMBA BARAT	4,72	2,46	3,93	4,27	3,56	4,04	3,77	2,52	2,70	3,29	3,52	1,19	3,33
SUMBA TIMUR	4,66	2,59	4,02	4,06	3,42	4,04	3,66	2,53	2,41	3,74	2,28	3,05	3,37
KUPANG	4,59	2,96	3,88	3,90	3,41	4,11	2,54	2,45	3,36	3,83	2,36	2,32	3,32
TIMOR TENGAH SELATAN	4,70	2,66	4,09	3,73	3,60	3,88	2,60	2,61	1,91	3,83	2,67	1,49	3,13
TIMOR TENGAH UTARA	4,10	2,65	4,35	3,98	3,57	4,38	2,90	3,16	2,36	3,60	2,62	3,42	3,44
BELU	4,73	3,60	4,29	3,87	3,41	3,68	4,05	2,78	2,52	3,62	4,17	2,07	3,52
ALOR	4,66	2,60	4,04	3,80	3,14	4,25	3,37	3,34	2,68	3,45	3,30	3,06	3,48
LEMBATA	4,57	3,04	4,40	3,63	3,59	4,35	3,38	3,01	2,49	3,19	1,70	1,90	3,27
FLORES TIMUR	4,63	3,01	4,39	3,66	3,43	4,13	3,95	2,73	2,35	3,67	2,01	2,68	3,39
SIKKA	4,64	2,82	4,33	4,06	3,63	4,19	3,29	3,11	2,60	3,67	2,50	3,56	3,53
ENDE	4,80	3,02	4,38	4,21	3,44	4,27	3,46	2,73	2,64	3,76	2,17	3,05	3,49
NGADA	4,26	2,62	4,10	3,95	3,66	4,39	3,00	2,47	2,54	3,50	2,82	3,00	3,36
MANGGARAI	4,77	3,24	4,36	4,06	3,57	4,42	3,77	2,69	2,60	3,62	3,64	3,34	3,69
NGADA	4,71	2,79	4,45	3,88	3,40	4,36	2,73	3,10	1,95	3,42	3,10	2,21	3,34
MANGGARAI BARAT	4,80	2,99	4,23	4,59	3,61	4,15	2,72	2,10	2,30	3,51	4,34	2,91	3,52
SUMBA TENGAH	3,91	2,42	3,66	4,20	3,68	4,18	3,07	2,30	2,18	3,69	1,49	1,44	2,96
SUMBA BARAT DAYA	4,22	2,58	4,04	3,95	3,68	3,66	3,35	2,35	1,29	3,51	2,32	2,41	3,11
NAGEKEO	4,56	2,66	4,05	3,86	3,60	4,33	2,41	2,44	1,95	3,27	2,69	2,00	3,17
MANGGARAI TIMUR	4,89	2,21	4,09	3,94	3,64	4,27	2,78	2,01	2,13	3,46	2,68	1,54	3,14
SABU RAIJUA	3,86	2,76	4,35	3,89	3,02	4,14	2,92	2,35	1,58	3,51	2,55	0,94	2,93
MALAKA	4,15	3,60	4,25	4,25	3,42	4,12	2,77	2,80	1,16	3,41	3,60	1,48	3,23
KOTA KUPANG	4,50	2,99	5,00	4,24	3,82	3,98	4,94	4,09	3,55	4,38	2,70	4,09	4,02

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 realisasi 3,52 dari target 3,50 dengan tingkat capaian sebesar 100,57% predikat **sangat tinggi**. Nilai IDSD 3,52 menunjukan menunjukkan posisi daya saing yang relatif baik, namun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek utama: tata kelola pemerintahan, kualitas SDM, infrastruktur, dan ekosistem inovasi. Untuk meningkatkan skor ini, pemerintah daerah harus fokus pada reformasi birokrasi, investasi pendidikan, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.

Dengan skor IDSD 3,52, Manggarai Barat sudah berada di atas rata-rata nasional (3,50), namun untuk mencapai daya saing yang lebih tinggi, fokus harus diberikan pada pemerataan pembangunan, penguatan SDM lokal, dan inovasi berbasis potensi daerah

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro dalam bidang perekonomian yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan perkembangan ekonomi secara keseluruhan dengan mengukur tingkat produktivitas daerah dalam menciptakan nilai ekonomi.

tabel 2.3.10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Kabupaten Manggarai Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2022–2025

Lapangan usaha		2022	2023	2024	2025
1		*2*	*3*	*4*	*5*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	1,67	2,19	1,53
B	Pertambangan dan Penggalian	3,38	5,33	4,75	2,07
C	Industri Pengolahan	6,84	12,54	10,37	20,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,80	11,23	29,19	47,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,91	5,13	1,94	11,44
F	Konstruksi	4,67	10,64	4,89	3,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,54	7,31	7,00	16,05
H	Transportasi dan Pergudangan	8,46	14,78	19,45	17,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,14	33,54	18,34	21,95
J	Informasi dan Komunikasi	3,20	3,58	3,18	2,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	2,63	4,16	85,47
L	Real Estate	4,28	4,83	6,42	6,88
M,N	Jasa Perusahaan	3,42	5,9	7,92	7,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	1,79	6,73	4,69
P	Jasa Pendidikan	-3,29	4,87	5,23	9,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,33	7,49	6,56	9,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,95	5,98	2,77	3,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**4,12**	**4,79**	**4,93**	**5,82**

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 realisasi 5,82 dari target 5,15 dengan tingkat capaian sebesar 113,01% predikat **sangat tinggi**. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 sebesar 5,82% berarti bahwa total nilai

produksi barang dan jasa (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) meningkat 5,82% dibandingkan tahun sebelumnya (2024) setelah memperhitungkan inflasi.

Faktor yang Mendorong Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 :

- Pariwisata: Manggarai Barat adalah pintu masuk ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, sehingga sektor pariwisata berkontribusi besar.
- Investasi infrastruktur: Pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan meningkatkan konektivitas.
- Perdagangan & jasa: Pertumbuhan UMKM dan sektor jasa mendukung peningkatan PDRB.
- Pertanian & perikanan: Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam, sektor ini juga memberi kontribusi.

Implikasi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 sebesar 5,82% adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah: Angka ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga momentum ekonomi, namun perlu memastikan pertumbuhan inklusif agar manfaat dirasakan masyarakat luas.
- Masyarakat: Pertumbuhan ekonomi biasanya membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki layanan publik.
- Investor: Angka 5,82% memberi sinyal bahwa daerah ini cukup prospektif untuk investasi, terutama di sektor pariwisata dan jasa.

tabel 2.3.11
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Kabupaten Manggarai Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2022–2025

Lapangan usaha		2022	2023	2024	2025
1		*2*	*3*	*4*	*5*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,52	1,67	2,19	1,53
B	Pertambangan dan Penggalian	3,38	5,33	4,75	2,07
C	Industri Pengolahan	6,84	12,54	10,37	20,59

D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,80	11,23	29,19	47,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,91	5,13	1,94	11,44
F	Konstruksi	4,67	10,64	4,89	3,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,54	7,31	7,00	16,05
H	Transportasi dan Pergudangan	8,46	14,78	19,45	17,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,14	33,54	18,34	21,95
J	Informasi dan Komunikasi	3,20	3,58	3,18	2,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	2,63	4,16	85,47
L	Real Estate	4,28	4,83	6,42	6,88
M,N	Jasa Perusahaan	3,42	5,9	7,92	7,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	1,79	6,73	4,69
P	Jasa Pendidikan	-3,29	4,87	5,23	9,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,33	7,49	6,56	9,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,95	5,98	2,77	3,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**4,12**	**4,79**	**4,93**	**5,82**

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2026

tabel 2.3.12
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT (Persen) 2022-2025

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Sumba Barat	3,23	3,7	3,75	5,21
2	Sumba Timur	2,63	3,07	3,63	4,75
3	Kupang	2,81	3,58	3,57	4,81
4	Timor Tengah Selatan	3,11	3,21	3,37	4,16
5	Timor Tengah Utara	2,81	3,04	3,25	4,48
6	Belu	3,19	3,76	3,99	5,18
7	Alor	2,98	4,09	4,34	4,57
8	Lembata	2,58	2,66	3,35	4,47
9	Flores Timur	1,73	3,00	2,90	4,98
10	Sikka	3,36	3,74	4,04	5,04
11	Ende	3,09	3,60	4,01	5,58
12	Ngada	3,06	3,50	3,66	4,28
13	Manggarai	2,85	3,77	3,94	5,09
14	Rote Ndao	3,52	2,79	3,21	7,96
15	Manggarai Barat	4,12	4,79	4,93	5,82
16	Sumba Tengah	2,52	2,91	3,71	5,07
17	Sumba Barat Daya	3,84	3,07	3,89	4,6
18	Nagekeo	3,06	3,04	3,16	4,61
19	Manggarai Timur	3,74	3,44	3,89	4,75
20	Sabu Raijua	3,00	2,28	4,70	5,09
21	Malaka	3,73	3,77	3,09	4,16

22	Kota Kupang	3,46	4,24	4,77	5,70
Provinsi Nusa Tenggara Timur		**3,08**	**3,49**	**3,87**	**5,14**

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur tahun 2026

7. Indeks Gini

Indeks Gini di tingkat kabupaten mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Komponen utamanya adalah distribusi pengeluaran per kapita, dibedakan antara wilayah perkotaan dan perdesaan Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang relatif sama. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat.

tabel 2.3.13
Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat sebesar tahun 2022-2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Indeks Gini	Indeks	0,3035	0,34	0,306	0,324	0,324 **

Sumber RPJMD Kab. Manggarai Barat 2025-2029

Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat sebesar tahun 2025 mengacu realisasi tahun 2024, karena nilainnya belum dirilis oleh lembaga terkait. Pada tahun 2024 indeks gini dengan realisasi 0,324 artinya tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran rumah tangga di wilayah tersebut relatif rendah dengan distribusi pengeluaran masyarakat cukup merata

Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat memiliki tren yang menurun dalam kurun waktu empat tahun terakhir Penurunan ketimpangan ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran rumah tangga di wilayah tersebut semakin berkurang. Indeks Gini Manggarai Barat sebesar 0,324 yang menurun dari tahun sebelumnya berarti

ketimpangan pengeluaran semakin kecil. Untuk menekan angka ini lebih lanjut, strategi utama adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sektor ekonomi lokal seperti pariwisata dan pertanian

Strategi Menekan Indeks Gini di Manggarai Barat :

a. Pemerataan Ekonomi Lokal :
    - Pariwisata inklusif: Libatkan masyarakat lokal dalam industri pariwisata (hotel, homestay, pemandu wisata, kuliner). Labuan Bajo sebagai destinasi utama harus memberi manfaat langsung ke warga sekitar.
    - Pertanian dan perikanan: Perkuat rantai pasok hasil tani dan ikan agar petani/nelayan mendapat harga lebih adil, bukan hanya tengkulak.
b. Peningkatan Akses Pendidikan & Kesehatan
    - Beasiswa dan pelatihan vokasi: Membuka peluang bagi anak muda untuk bekerja di sektor pariwisata, teknologi, dan jasa.
    - Layanan kesehatan merata: Mengurangi beban biaya kesehatan agar pengeluaran rumah tangga lebih seimbang
c. Program Sosial & Perlindungan
    - Bantuan sosial tepat sasaran: Pastikan subsidi dan bantuan pemerintah menjangkau kelompok miskin.
    - Pemberdayaan UMKM: Kredit mikro dan pelatihan usaha kecil agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.
d. Infrastruktur & Konektivitas
    - Transportasi desa–kota: Jalan dan akses transportasi yang lebih baik memudahkan distribusi barang dan jasa.
    - Digitalisasi desa: Internet murah dan merata membuka peluang usaha berbasis digital.

8. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata pendapatan

masyarakat di suatu daerah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). PDRB per kapita adalah indikator ekonomi makro yang diperoleh dengan membagi total pendapatan ekonomi suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang bersangkutan. Di tingkat daerah, pendapatan per kapita umumnya direpresentasikan melalui PDRB per kapita, yang dihitung dengan membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Indikator ini memberikan gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah dalam periode tertentu. PDRB per kapita tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Misalnya, jika ada ketimpangan ekonomi, angka rata-rata bisa tinggi tetapi sebagian besar masyarakat tetap berpenghasilan rendah.

PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 realisasi 17.758 (ribu rupiah) dari target 17,02 (ribu rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 104,34% predikat **sangat tinggi.** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 sebesar 17.758 (ribu rupiah) berarti bahwa rata-rata pendapatan ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk adalah sekitar Rp17,758,000 per orang per tahun. Nilai ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan (karena bisa saja timpang). Jadi, PDRB per kapita Manggarai Barat tahun 2025 sebesar Rp17,7 juta menunjukkan rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat, dengan kontribusi besar dari pariwisata dan pembangunan infrastruktur

Faktor yang Mempengaruhi peningkatan PDRB per kapita Manggarai Barat tahun 2025 sebesar Rp17,7 juta adalah sebagai berikut :

- Pariwisata Labuan Bajo: menjadi motor utama ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah.
- Jumlah penduduk: semakin sedikit penduduk dengan PDRB besar, semakin tinggi nilai per kapita.

- Sektor produktif lain: pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.
- Infrastruktur & investasi: pembangunan bandara, pelabuhan, dan fasilitas wisata meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Implikasi peningkatan PDRB per kapita Manggarai Barat tahun 2025 sebesar Rp17,7 juta adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah: Angka ini bisa menjadi indikator untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pemerataan.
- Masyarakat: PDRB per kapita yang meningkat menunjukkan adanya peluang ekonomi lebih besar, meski belum tentu semua orang merasakan secara merata.
- Investor: Menunjukkan potensi pasar dan daya beli masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan jasa.

Berikut ini disajikan data realisasi PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah provinsi NTT tahun 2022-2025.

tabel 2.3.14
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT (ribu rupiah), 2022-2025

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
1	Sumba Barat	17.245	18.279	19.400	20.625
2	Sumba Timur	27.133	28.733	30.114	32.391
3	Kupang	22.733	24.436	26.499	28.501
4	Timor Tengah Selatan	18.836	19.993	21.219	22.462
5	Timor Tengah Utara	16.822	17.778	18.738	19.768
6	Belu	22.251	23.732	25.170	26.765
7	Alor	15.425	16.416	17.723	18.775
8	Lembata	14.492	15.228	15.975	16.953
9	Flores Timur	19.903	21.046	22.048	23.514
10	Sikka	17.259	18.474	19.873	21.138
11	Ende	24.630	26.491	28.061	30.220
12	Ngada	22.549	23.957	25.689	27.065
13	Manggarai	15.780	16.724	17.709	18.756
14	Rote Ndao	23.654	24.793	25.603	27.904
15	**Manggarai Barat**	**14.621**	**15.712**	**16.663**	**17.758**
16	Sumba Tengah	14.698	15.354	16.536	17.674
17	Sumba Barat Daya	13.242	13.982	14.890	15.759
18	Nagekeo	15.189	16.061	17.038	17.884
19	Manggarai Timur	12.789	13.516	14.367	15.228
20	Sabu Raijua	16.824	17.445	18.699	19.967
21	Malaka	16.681	17.919	19.482	20.661
22	Kota Kupang	57.199	61.257	65.003	69.462

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Provinsi Nusa Tenggara Timur			**23,08**	**24,3**	**25,84**
Nasional					**83,70**

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur tahun 2026

9. Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah (IID) merupakan indikator komposit yang mengukur ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu wilayah. Untuk Kabupaten Manggarai Barat, penyusunan indeks ini sangat krusial karena statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Secara umum, komponen penyusun Indeks Infrastruktur di Manggarai Barat terbagi ke dalam beberapa dimensi utama:

- Infrastruktur Dasar (Pelayanan Dasar)
  - Akses Air Minum Layak: Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum terlindungi.
  - Sanitasi Layak: Persentase rumah tangga dengan akses fasilitas pembuangan ekskreta yang memadai.
  - Infrastruktur Permukiman: Persentase rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh (terutama di sekitar wilayah Labuan Bajo).
- Infrastruktur Konektivitas (Transportasi)
  - Kondisi Jalan: Persentase kemantapan jalan kabupaten (jalan dalam kondisi baik dan sedang).
  - Infrastruktur Udara: Kapasitas dan fasilitas Bandara Internasional Komodo.
  - Infrastruktur Laut: Kapasitas pelabuhan logistik (Pelabuhan Multi-Purpose Wae Kelambu) dan pelabuhan penumpang/wisata (Marina Labuan Bajo).
- Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi
  - Rasio Elektrifikasi: Cakupan wilayah yang sudah teraliri listrik PLN, termasuk ke desa-desa di pelosok Manggarai Barat.

- Infrastruktur Digital: Ketersediaan sinyal 4G/5G dan penetrasi internet (Broadband), terutama untuk mendukung program Smart City Labuan Bajo

- Infrastruktur Pendukung Pariwisata
  - Fasilitas Umum Wisata: Ketersediaan pusat informasi turis, toilet standar internasional di lokasi wisata, dan trotoar (pedestrian) yang ramah wisatawan.
  - Pengolahan Limbah & Sampah: Keberadaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan sistem pengelolaan sampah terpadu untuk menjaga ekosistem taman nasional.

Kondisi saat ini :

Kekuatan: Infrastruktur pariwisata (bandara, pelabuhan, hotel, jalan utama) berkembang pesat karena Labuan Bajo ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas Nasional.

Kelemahan: Infrastruktur dasar di desa-desa terpencil masih tertinggal, terutama akses jalan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Pentingnya Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Manggarai Barat :

- Pemerintah daerah: Menjadi acuan untuk memperbaiki ketimpangan antara kawasan wisata dan desa pedalaman.
- Masyarakat: Semakin tinggi indeks, semakin baik akses terhadap layanan publik.
- Investor: Infrastruktur yang baik meningkatkan daya tarik investasi, terutama di sektor pariwisata dan jasa.

Indeks Infrastruktur Daerah (IID) Kabupaten Manggarai Barat sebesar tahun 2025 mengacu realisasi tahun 2024, karena nilainnya belum dirilis oleh lembaga terkait. Indeks infrastruktur Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 nilai sebesar 85,86. Sementara Indeks Infrastruktur Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 diukur menggunakan perhitungan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Capaian indeks infrastruktur tahun 2024 menunjukkan adanya upaya konsisten dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam memperbaiki dan mengembangkan

sarana prasarana publik, seperti transportasi, utilitas dasar, dan fasilitas sosial. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi daya saing wilayah, kenyamanan warga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga tren peningkatan ini dengan merancang kebijakan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

10. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan di Indonesia dihitung serta dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 mencapai 69,20, meningkat 0,52 poin atau 0,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 68,68. Selama 2021–2025, IPM Kabupaten Manggarai Barat rata-rata meningkat sebesar 1,12 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

tabel 2.3.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2025

Indikator	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Pertumbuhan
1	*2*	*3*	*4*
IPM Total	68.68 tahun	69.02 tahun	0,76%
Umur Harapan Hidup	72,86 tahun	73,24 tahun	+0,38 tahun
Harapan Lama Sekolah	12,54 tahun	12,62 tahun	+0,08 tahun
Rata-rata Lama Sekolah	8,21 tahun	8,26 tahun	+0,05 tahun
Pengeluaran Per Kapita	8,19 juta	8,35 juta	1,90%

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2026

Peningkatan IPM sangat dipengaruhi oleh kemajuan pada tiga dimensi utama :

- Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat)
  - Umur Harapan Hidup (UHH): Bayi yang lahir di Manggarai Barat pada tahun 2025 memiliki harapan hidup hingga 73,24 tahun.
  - Faktor Pendukung: Perbaikan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting (meskipun masih menjadi tantangan/PR daerah), serta akses yang lebih baik ke layanan kesehatan melalui digitalisasi dan infrastruktur.
- Dimensi Pengetahuan (Pendidikan)
  - Harapan Lama Sekolah (HLS): Meningkat menjadi 12,62 tahun. Ini berarti secara rata-rata, anak-anak di Manggarai Barat diharapkan bisa mengenyam pendidikan hingga diploma satu (D1) atau awal perguruan tinggi.
  - Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Meningkat menjadi 8,26 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMP kelas 2 atau 3.
- Dimensi Standar Hidup Layak (Ekonomi)
  - Pengeluaran Per Kapita: Mencapai 8,35 juta rupiah per tahun pada 2025. Terjadi peningkatan sebesar Rp156 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
  - Faktor Pendukung: Sektor pariwisata yang kian inklusif di Labuan Bajo memberikan dampak ekonomi turunan (multiplier effect) bagi warga lokal, serta peningkatan investasi dan optimalisasi PAD yang dialokasikan kembali untuk pembangunan masyarakat.

tabel 2.3.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2022–2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Umur Panjang dan Hidup Sehat					

Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	72,35	72,59	72,86	73,24
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,31	12,53	12,54	12,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,8	7,94	8,21	8,26
Standar Hidup Layak	2024				
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu/rupiah	7.636	7.913	8.195	8.351

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2026

tabel 2.3.17
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dan Provinsi menurut dimensi penyusunnya, Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Sumba Barat	71,63	13,41	7,39	8,53	68,46
Sumba Timur	71,91	12,88	7,94	10,619	70,99
Kupang	69,91	13,91	7,87	8,745	69,03
Timor Tengah Selatan	71,47	12,63	7,43	7,951	66,88
Timor Tengah Utara	71,39	13,39	8,36	7,364	67,87
Belu	74,77	12,33	7,73	8,354	68,89
Alor	71,33	12,59	8,72	8,022	68,44
Lembata	73,81	12,54	8,49	8,397	69,7
Flores Timur	74,37	13,17	8,19	8,7	70,61
Sikka	74,64	13,68	7,2	9,219	70,65
Ende	73,06	13,84	8,52	10,126	72,73
Ngada	74,89	12,76	8,84	9,827	72,53
Manggarai	72,76	13,74	8,17	8,423	70,1
Rote Ndao	70,17	13,24	7,84	7,652	67,01
Manggarai Barat	73,24	12,62	8,26	8,351	69,20
Sumba Tengah	69,77	13,15	7,5	6,965	65,29
Sumba Barat Daya	69,46	13,12	6,47	7,588	64,82
Nagekeo	72,89	12,74	8,47	9,213	70,48
Manggarai Timur	73,19	12,67	8,11	6,745	66,63
Sabu Raijua	66,88	13,2	7,1	6,452	62,74
Malaka	71,72	12,84	7,38	7,067	65,84
Kota Kupang	75,38	16,55	11,66	14,262	83,65
Nusa Tenggara Timur	**72,16**	**13,34**	**8,22**	**8,735**	**69,89**
Nasional					**75,90**

Sumber : BPS Manggarai Barat/ Prov. NTT/ Nasonal tahun 2026

11. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri mencerminkan batas minimum pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Jika pendapatan seseorang atau rumah tangga berada di bawah batas tersebut, mereka dikategorikan sebagai miskin. Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (misalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan).

tabel 2.3.18
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat 2022 - 2025

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4	5	6	7
1	2022	4,44	1,36	405.746	49,95	17,15
2	2023	3,59	1,05	444.474	49,95	16,82
3	2024	3,55	0,96	458.834	50,68	16,74
4	2025	2,96	0,81	477.226	49,55	16,09

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2026

Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 realisasi 16,09 dari target 16,5 dengan tingkat capaian 102,48% , predikat **sangat tinggi,** Tingkat kemiskinan 16,09 berarti bahwa 16,09% dari total penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 16,09% menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun angka tersebut tetap menandakan bahwa sekitar 16 dari setiap 100 orang di wilayah itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang cenderung menurun pada tahun 2022–2025. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukan tren yang cenderung menurun, pada tahun 2025 dengan realisasi Nilai 2,96 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin masih kekurangan sekitar 2,96% dari kebutuhan

minimum yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan juga menunjukan tren yang cenderung menurun, pada tahun 2025 dengan realisasi menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin cukup besar. Semakin tinggi nilainya, semakin besar perbedaan antara mereka yang "hampir miskin" (dekat garis kemiskinan) dengan yang "sangat miskin" (jauh di bawah garis kemiskinan).

Berikut Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Teggara Timur 2024 dan 2025

tabel 2.3.19
Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Teggara Timur 2024 dan 2025

No	Kabupaten / Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)/Nasional (Juta)		Persentase Penduduk Miskin	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumba Barat	441.428	460.702	36,72	37,08	26,52	26,47
2	Sumba Timur	460.384	481.754	73,58	70,35	27,04	25,64
3	Kupang	486.458	504.863	90,34	87,50	21,37	20,32
4	Timor Tengah Selatan	436.707	454.423	117,41	116,74	24,68	24,50
5	Timor Tengah Utara	499.772	516.059	55,03	53,44	20,89	20,17
6	Belu	476.703	490.904	32,57	30,40	13,86	12,79
7	Alor	446.875	464.871	41,89	38,68	19,87	18,29
8	Lembata	517.948	538.773	37,72	36,78	24,22	23,27
9	Flores Timur	412.744	429.094	29,74	28,92	11,25	10,88
10	Sikka	434.074	447.472	38,73	36,74	11,89	11,25
11	Ende	528.259	549.363	62,37	58,92	22,57	21,31
12	Ngada	489.139	510.269	20,48	19,53	11,87	11,22
13	Manggarai	454.625	472.888	68,39	65,81	19,01	18,10
14	Rote Ndao	426.843	443.901	52,89	51,64	25,78	24,73
15	Manggarai Barat	458.834	477.226	50,68	49,55	16,74	16,09
16	Sumba Tengah	381.760	397.817	23,81	22,81	30,84	29,23
17	Sumba Barat Daya	494.229	513.816	102,05	97,68	27,20	25,66
18	Nagekeo	487.814	516.140	18,68	18,63	12,30	12,18
19	Manggarai Timur	458.116	485.247	74,59	70,99	24,90	23,51
20	Sabu Raijua	549.947	571.961	30,98	30,65	28,13	27,18
21	Malaka	474.853	494.018	28,54	28,05	13,92	13,52
22	Kota Kupang	761.108	794.609	40,38	37,91	8,24	7,57
Prov. Nusa Tenggara Timur		527.275	549.607	1.127,5	1.088,78	19,48	18,60

Nasional	566.655	610.257	24,06	23,85	8,57	8,25

Sumber : BPS Manggarai Barat dan Prov. Nusa Tenggara Timur dan Nasional tahun 2026

Menganalisis tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2025 memerlukan kacamata khusus, mengingat wilayah ini merupakan rumah bagi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Meskipun pariwisata tumbuh pesat, tantangan kemiskinan di wilayah ini bersifat struktural dan geografis. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhinya:

- Ketimpangan Ekonomi
  - Trickle-down Effect yang Lambat: Pertumbuhan hotel mewah dan restoran di kota belum sepenuhnya merembes ke desa-desa di pedalaman Manggarai Barat.
  - Kesenjangan Keterampilan: Masyarakat lokal seringkali kalah bersaing dengan tenaga kerja luar daerah dalam mengisi posisi strategis di industri pariwisata, sehingga mereka tetap terjebak di sektor informal dengan upah rendah
- Sektor Pertanian yang Belum Optimal
  - Alih Fungsi Lahan: Masifnya pembangunan properti pariwisata mengurangi luas lahan pertanian.
  - Rantai Pasok: Bahan pangan untuk hotel-hotel besar seringkali didatangkan dari luar daerah (Surabaya,Makassar,NTB dan beberapa daerah di wilayah NTT) karena produksi lokal belum mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas industri.
  - Iklim: Kerentanan terhadap perubahan cuaca memengaruhi hasil panen petani tadah hujan.
- Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar
  - Daerah Terisolir: Masih ada desa-desa yang sulit diakses transportasi darat, yang menyebabkan biaya logistik mahal dan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi (inflasi lokal).
  - Layanan Dasar: Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi di wilayah pelosok berkontribusi pada rendahnya

kualitas kesehatan, yang secara jangka panjang memperpetuasi siklus kemiskinan

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Angka Stunting: Masalah gizi kronis (stunting) masih menjadi tantangan di NTT, termasuk Manggarai Barat, yang berdampak pada produktivitas generasi mendatang.
  - Pendidikan: Masih rendahnya rata-rata lama sekolah membuat penduduk lokal sulit masuk ke sektor ekonomi modern yang membutuhkan sertifikasi khusus.

12. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (≥15 tahun) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja tetapi aktif mencari.

TPT dihitung dengan formula:

TPT=Jumlah Pengangguran Terbuka/Jumlah Angkatan Kerja X 100%

tabel 2.3.20
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan selama seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kab. Manggarai Barat, Tahun 2025

No	Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	*2*		*3*	*4*	*5*
I	Angkatan Kerja		79.673	60.609	140.282
	1	Bekerja	77.066	58.565	135.631
	2	Pengangguran Terbuka	2.607	2.044	4.651
II	Bukan Angkatan Kerja		17.634	36.614	54.248
	1	Sekolah	10.000	10.514	20.514
	2	Mengurus Rumah Tangga	2.214	24.378	26.592
	3	Lainnya	5.420	1.722	7.142
Penduduk Usia Kerja (PUK)			97.307	97.223	194.530
Tingkat Pengangguran Terbuka			3,27	3,37	3,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			81,88	62,34	72,11

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,32%. Angka 3,32% menunjukan:

- Proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja;
- Mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Manggarai Barat terserap dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor pariwisata, perikanan, maupun perdagangan lokal, namun, tetap ada tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.

Beberapa permasalahan ketenagakerjaan di Manggarai Barat :

- Keterbatasan lapangan kerja dibanding jumlah pencari kerja.
- Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri (skill mismatch).
- Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja.
- Krisis ekonomi atau perlambatan pertumbuhan yang mengurangi permintaan tenaga kerja.

Beberapa Upaya terkait ketenagakerjaan di Manggarai Barat :

- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri.
- Mendorong kewirausahaan dan UMKM.
- Investasi pemerintah dan swasta untuk membuka lapangan kerja baru.

tabel 2.3.21
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Di Prov.NTT dan Nasional tahun 2023 – 2025

No	Kabupaten / Kota	TPT		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
1	Sumba Barat	3,52	3,21	3,27
2	Sumba Timur	2,21	3,46	3,36
3	Kupang	3,22	3,36	3,53
4	Timor Tengah Selatan	2,64	2,63	3,57
5	Timor Tengah Utara	1,96	1,82	2,54

6	Belu	5,45	5,41	5,20
7	Alor	2,52	2,27	2,08
8	Lembata	2,55	2,18	1,37
9	Flores Timur	3,79	3,58	6,36
10	Sikka	2,62	2,33	2,62
11	Ende	2,59	2,05	2,95
12	Ngada	4,00	2,68	2,60
13	Manggarai	2,44	1,17	1,56
14	Rote Ndao	3,65	2,42	2,18
15	Manggarai Barat	4,42	3,47	3,32
16	Sumba Tengah	1,89	1,89	2,49
17	Sumba Barat Daya	2,08	2,64	1,70
18	Nagekeo	3,54	2,17	1,31
19	Manggarai Timur	1,63	0,51	1,24
20	Sabu Raijua	4,06	3,99	3,12
21	Malaka	3,06	1,58	2,07
22	Kota Kupang	5,69	8,60	8,61
	Nusa Tenggara Timur	3,14	3,02	3,31
	Nasional	5,3	4,9	4,9

Sumber : BPS Manggarai Barat dan Prov. Nusa Tenggara Timur dan Nasional tahun 2026

13. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai. Dalam konteks pembangunan daerah, stunting menjadi salah satu indikator negatif yang harus ditekan sesuai target RPJMD. Sementara itu, EPPGM (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) adalah instrumen evaluasi yang digunakan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kinerja pemerintah daerah, termasuk capaian indikator pembangunan seperti penurunan stunting

Prevalensi Stunting Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 mengacu realisasi tahun 2024, karena nilainnya belum dirilis oleh lembaga terkait. Prevalensi Stunting dari dokumen SKI dalam angka tahun 2024 sebesar 31,10. Prevalensi stunting Manggarai Barat menurut SSGI tahun 2024 sebesar 31,10% berarti sekitar 31 dari 100 balita di kabupaten tersebut mengalami stunting. Angka 31,10% termasuk kategori tinggi, karena WHO menetapkan ambang batas masalah kesehatan masyarakat jika prevalensi stunting di atas 20%. Ini menunjukkan bahwa Manggarai Barat masih menghadapi tantangan

besar dalam pemerataan gizi, akses layanan kesehatan ibu-anak, sanitasi, dan edukasi pola asuh

Prevalensi stunting Manggarai Barat tahun 2024 sebesar 31,10% menunjukkan masalah gizi kronis yang cukup serius. Untuk menekan angka ini, diperlukan rencana perbaikan dan tindak lanjut terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta antara lain :

a. Intervensi Gizi Ibu & Anak
   - Pemberian makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil dan balita.
   - Edukasi tentang ASI eksklusif dan MP-ASI yang tepat.
   - Suplementasi zat besi, vitamin, dan tablet tambah darah bagi ibu hamil.

b. Peningkatan Layanan Kesehatan
   - Memperkuat Posyandu dan Puskesmas di desa terpencil.
   - Pemantauan rutin pertumbuhan balita (pengukuran tinggi/berat badan).
   - Pelatihan kader kesehatan desa agar mampu mendeteksi dini stunting.

c. Perbaikan Sanitasi & Air Bersih
   - Program jamban sehat dan akses air minum layak.
   - Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Berikut perbandingan Prevalensi stunting antat Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT 2025 menurut data Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) (EPPGM)

tabel 2.3.22
Jumlah Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2025

No	Kabupaten / Kota	Status Tinggi Badan/Umur					
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting	Persentase Stunting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumba Barat	483	1.328	6.022	12	1.811	23,09
2	Sumba Timur	623	2.643	15.202	6	3.266	17,68

No	Kabupaten / Kota	Status Tinggi Badan/Umur					
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Stunting	Persentase Stunting
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kupang	967	2.774	21.198	9	3.741	14,99
4	Timor Tengah Selatan	3.978	8.251	17.197	144	12.229	41,36
5	Timor Tengah Utara	1.259	3.681	11.516	3	4.940	30,01
6	Belu	1.091	2.997	9.880	11	4.088	29,25
7	Alor	705	2.184	9.889	12	2.889	22,59
8	Lembata	127	641	6.534	2	768	10,51
9	Flores Timur	503	2.213	11.832	3	2.716	18,67
10	Sikka	457	1.676	15.387	12	2.224	12,62
11	Ende	233	892	12.760	8	1.125	8,09
12	Ngada	307	1.006	8.911	2	1.313	14,23
13	Manggarai	620	2.063	17.392	8	2.683	13,36
14	Rote Ndao	431	1.350	9.190	2	1.780	16,23
15	Manggarai Barat	504	1.798	18.173	5	2.302	11,24
16	Sumba Tengah	187	758	4.783	1	944	16,48
17	Sumba Barat Daya	1.830	4.261	9.706	22	6.090	38,50
18	Nagekeo	236	1.034	7.562	5	1.270	14,38
19	Manggarai Timur	294	1.404	19.073	18	1.698	8,17
20	Sabu Raijua	414	1.165	5.629	1	1.579	21,90
21	Malaka	1.024	2.458	10.147	20	3.482	25,51
22	Kota Kupang	788	2.479	16.369	27	3.258	16,58
	Nusa Tenggara Timur	17.059	49.136	263.351	332	66.195	20,07

Sumber : BPS Prov. Nusa Tenggara Timur tahun 2026

14. Indeks Reformasi Birokrasi

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 menjadi pedoman transisi reformasi birokrasi sebelum diberlakukannya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029. Edaran ini menekankan percepatan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang modern dan inklusif. Surat Edaran Menteri PANRB No. 6 Tahun 2025 adalah instrumen transisi penting yang memastikan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten menuju arah baru: birokrasi digital, inklusif, dan berdampak nyata. Bagi instansi pemerintah, SE ini menjadi pedoman operasional sebelum dokumen strategis jangka panjang resmi diberlakukan

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabuppaten Manggarai Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2.5
Overview Nilai RB 2025 Sementara Tahun 2025

Uraian	Nilai
1	2
RB General Awal	62,07
Koefisien	0
RB General	62,07
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	62,07
RB Tematik	6,84
Indeks Reformasi Birokrasi	68,91

Sumber : Kementerian PANRB tahun 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 realisasi 68,91 dari target 70,00 dengan tingkat capaian 94,44 % , kategori/predikat "B" (baik) interprestasi : memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Beberapa ketentuan pelaksanaan evaluasi RB pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024. Monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan perbaikan kinerja birokrasi secara sistematis dan berdampak nyata
b. Instrumen Evaluasi RB Tahun 2025 masih mengacu pada ketentuan evaluasi yang digunakan pada evaluasi RB tahun 2024

c. Dalam rangka mendukung proses evaluasi dimaksud, seluruh instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Rencana Aksi RB General disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi RB Tahun 2024
2) Rencana Aksi RB Tematik untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi disusun sebagai tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024. Kedua tema ini masih dilanjutkan menjadi prioritas RB Tematik pada periode 2025–2029.
3) Instansi pemerintah diharapkan mulai menyusun Rencana Aksi untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru, yaitu:
   - RB Mendorong Hilirisasi,
   - RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan,
   - RB Mendukung Ketahanan Pangan, dan
   - RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan
4) Pengisian Rencana Aksi Tahun 2025 dilakukan melalui Portal RB, dengan periode pengisian dimulai pada bulan Agustus 2025 dan berakhir pada periode Monitoring Tindak Lanjut oleh TPN pada bulan November 2025, dan akan dibuka kembali pada bulan Januari 2026 untuk pembaruan data capaian triwulan IV tahun 2025.

d. Adapun mekanisme penilaian Evaluasi RB Tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut:

- Penilaian Rencana Aksi RB General merupakan penilaian atas rencana tindak lanjut dari catatan dan rekomendasi hasil evaluasi RB tahun 2024, serta penilaian atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.
- Penilaian Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas:

- Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi;
- Sedangkan 3 (tiga) tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya.

15. Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan, maksudnya adalah seberapa besar kontribusi PAD dalam meningkatkan total pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah (termasuk dana transfer dari pusat):

tabel 2.3.23
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)	
		ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
4	PENDAPATAN DAERAH	1.334.748.548.539	1.314.461.555.275,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	281.344.746.427	286.390.515.490,24
4.1.01	Pajak Daerah	206.516.061.416	203.242.435.088,66
4.1.01.07	Pajak Restoran	49.654.986.782	48.719.668.696,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	489.084.943	811.565.346,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	5.628.525	27.342.020,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.289.172.880	3.918.679.180,93
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.461.633.634	10.088.690.416,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.496.525.699	37.023.523.951,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	87.942.712.430	93.809.398.210,73
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.282.608.942	4.062.296.030,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.893.707.581	4.781.271.238,00
4.1.02	Retribusi Daerah	65.186.368.392	72.076.174.668,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	53.860.316.704	56.230.389.822,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.178.745.526	11.872.231.015,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)	
		ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.147.306.162	3.973.553.831,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.087.383.999	4.087.383.999,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.087.383.999	4.087.383.999,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.554.932.620	6.984.521.734,58
4.1.04.05	Jasa Giro	1.020.159.048	1.304.365.584,13
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.616.438	63.013.769,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.295.331.062	1.133.382.088,65
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	308.217.704	291.862.571,75
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	370.810.140	1.533.990.171,27
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	852.728.841	1.541.357.549,78
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	647.069.387	-
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.050.000.000	1.116.550.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.033.632.796.717	1.006.411.339.848,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.007.598.709.800	977.164.001.452,00
4.2.01.05	Dana Desa	143.972.946.000	123.719.521.080,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.112.648.000	15.112.648.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	9.310.919.800	9.401.069.511,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	604.082.715.000	597.599.954.799,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	235.119.481.000	231.330.808.062,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.034.086.917	29.247.338.396,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26.034.086.917	29.247.338.396,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.771.005.395	21.659.699.937,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.771.005.395	21.659.699.937,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	6.651.250.395	6.651.250.395,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.119.755.000	15.008.449.542,00

Sumber : BAPENDA Kab. Manggarai Barat tahun 2026

Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan

= PAD/ Total Pendapatan Daerah×100

= Rp.1.314.461.555.275,24 / Rp. 286.390.515.490,24 X 100

= 21,79%

Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan tahun 2025 menunjukan realisasi 21,79% dari target 18,57% dengan tingkat

capaian 117,34 % , predikat **sangat tinggi**. Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan sebesar 21,79% berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 21,79% terhadap total pendapatan daerah (APBD) pada tahun 2025 serta menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal. Sedangkan pertumbuhan PAD 2025 terhadap PAD 2024 sebesar 0,05% dengan formula :

$$\text{Pertumbuhan (\%)} = \frac{\text{Nilai Tahun Ini} - \text{Nilai Tahun Lalu}}{\text{Nilai Tahun Lalu}} \times 100\%$$

$$= \frac{286390515490{,}24 - 273711972882{,}45}{273.711.972.882{,}45} \times 100\%$$

1,05 %

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Secara garis besar, kenaikan PAD tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi antara kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan optimalisasi teknologi
Berikut adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi peningkatan pertumbuhan PAD di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 :

- Faktor Ekonomi Makro
  - Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (PDRB), semakin besar pula aktivitas konsumsi dan produksi yang menjadi objek pajak.
  - Laju Inflasi: Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat, sehingga setoran pajak hotel, restoran, dan hiburan tetap stabil.
  - Investasi: Masuknya investor baru membuka lapangan kerja dan meningkatkan pajak dari sektor perizinan serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Kebijakan dan Legalitas

  Pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk memungut pendapatan
  - Peraturan Daerah (Perda): Penyesuaian tarif pajak atau retribusi melalui Perda baru sering kali menjadi pemicu kenaikan PAD.

- Penyederhanaan Birokrasi**:** Proses perizinan yang mudah (seperti melalui sistem OSS) menarik lebih banyak pelaku usaha untuk melegalkan bisnisnya, yang otomatis menambah basis pajak.

- Optimalisasi Sumber Pendapatan
  - Ekspansi Objek Pajak: Mencari sumber pendapatan baru (misalnya pajak parkir di lokasi baru atau retribusi sampah yang lebih terorganisir).
  - Pengelolaan BUMD: Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sehat akan memberikan kontribusi berupa dividen yang masuk ke kantong PAD.
- Digitalisasi dan Teknologi (E-Government)
  - Sistem Pajak Online: Penggunaan tapping box di restoran atau hotel meminimalisir kecurangan (kebocoran pajak) karena transaksi tercatat secara real-time.
  - Kemudahan Pembayaran: Adanya aplikasi mobile atau kerja sama dengan e-commerce membuat warga lebih rajin membayar pajak karena tidak perlu mengantri di bank
- Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak
  - Audit dan Penegakan Hukum: Tindakan tegas terhadap penunggak pajak meningkatkan wibawa pemerintah daerah dan mendorong kepatuhan

Berikut Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2022–2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

tabel 2.3.24
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2022–2025

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PENDAPATAN DAERAH	1.255.652.663.532,58	1.466.847.183.113,94	1.386.634.972.396	1.314.461.555.275
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190.932.174.516,58	249.055.576.180,94	273.711.972.882	286.390.515.490
3	PAD TERHADAP PENDAPATAN %	15,21	16,98	19,74	21,79

Sumber : BAPENDA Ka.Manggarai Barat tahun 2026

Berikut perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antar Kabupaten dan Provinsi 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

tabel 2.3.25
Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

No	Uraian	Kabuaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Timur	Prov. NTT (miliar rupiah)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pendapatan Daerah	1.314.461.555.275	1.023.286.306.406	4.428,55
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	286.390.515.490	60.890.142.182	1.280,59
3	PAD Terhadap Pendapatan %	21,79	5,95	28,92

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab. .Manggarai Barat tahun 2026

2.3.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan program yang mendukung dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Efisiensi tidak hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga bagaimana sumber daya dialokasikan secara tepat untuk menghasilkan kinerja optimal. Program yang mendukung harus benar-benar memberi nilai tambah terhadap pencapaian hasil, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif di mana penentuan tujuan dan sasaran sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang tersedia. Program telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja utama (IKU). Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

tabel 2.3.26
Efisiensi penggunaan sumber daya dan program yang mendukung dikaitkan dengan hasil (kinerja)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Indeks	68,4	65,28	95,44	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	933.708.100	832.013.518	89,11
						2	Program Pemasaran Pariwisata	123.571.500	114.985.900	93,05
						3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000	99,17
						4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	296.180.900	295.797.000	99,87
						5	Program Pengembangan Kebudayaan	1.898.440.200	1.802.718.737	94,96
						6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	142.315.000	141.896.100	99,71
						7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	13.646.000	13.259.700	97,17
						8	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	115.788.000	111.571.200	96,36

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
						9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	115.736.900	110.183.000	95,20
						10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.846.900	41.602.500	90,74
						11	Program Pengelolaan Persampahan	9.079.470.000	9.056.137.246	99,74
						12	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.681.755.100	1.480.121.212	88,01
						13	Program Penempatan Tenaga Kerja	202.045.700	189.253.475	93,67
						14	Program Hubungan Industrial	682.732.500	674.178.231	98,75
						15	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.679.692.800	5.214.707.774	91,81
						16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	355.225.000	220.126.500	61,97
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,98	77	97,49	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	13.646.000	13.259.700	97,17
						2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	115.788.000	111.571.200	96,36
						3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	115.736.900	110.183.000	95,20
						4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.846.900	41.602.500	90,74
						5	Program Pengelolaan Persampahan	9.079.470.000	9.056.137.246	99,74
						6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	72.097.500	69.943.900	97,01
						7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.102.265.318	11.426.088.612	87,21
						8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	6.420.980.000	5.999.735.099	93,44

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
						9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.882.459.000	1.848.899.157	98,22
3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	123,09	188,82	46,60	1	Program Penanggulangan Bencana	565.094.500	535.095.193	94,69
						2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	115.788.000	111.571.200	96,36
						3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.846.900	41.602.500	90,74
						4	Program Pengelolaan Persampahan	9.079.470.000	9.056.137.246	99,74
						5	Program Penyelenggaraan Jalan	40.151.902.662	20.864.655.730	51,96
						6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.294.943.600	1.293.681.330	30,12
						7	Program Pengelolaan Pelayaran	100.106.700	30.505.393	30,47
						8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	799.098.147	540.004.811	67,58
						9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	686.641.400	668.473.505	97,35
						10	Program Rehabilitasi Sosial	2.053.851.135	1.940.674.727	94,49
4	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,5	3,52	100,57	1	Program Penyelenggaraan Jalan	40.151.902.662	20.864.655.730	51,96
						2	Program Pengelolaan Pendidikan	89.418.823.517	87.009.614.421	97,31
						3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	168.978.285.492	150.494.322.216	89,06
						4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	43.528.500	40.928.800	94,03
						5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.552.324.300	1.427.869.316	91,98
						6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.044.461.900	1.024.345.679	98,07
						7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.720.000	54.327.600	92,52
						8	Program Pemerintahan dan	5.679.692.800	5.214.707.774	91,81

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							Kesejahteraan Rakyat			
						9	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	77.748.800	61.428.300	79,01
						10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	352.200.000	344.910.000	97,93
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	5,82	113,01	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.387.700	1.500.000	8,63
						2	Program Pelayanan Penanaman Modal	834.110.100	766.570.923	91,90
						3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	154.135.000	81.520.000	52,89
						4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	16.165.000	13.762.000	85,13
						5	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	55.382.700	53.749.795	97,05
						7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.681.755.100	1.480.121.212	88,01
						8	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000	99,17
						9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	250.615.000	250.615.000	100,00
						10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.922.917.000	1.857.398.744	96,59
						11	Program Perekonomian Dan Pembangunan	962.146.300	741.344.671	77,05
						12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	679.860.000	679.375.102	99,93
						13	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	20.790.000	18.690.000	89,90
						14	Program Perencanaan Dan	1.922.917.000	1.857.398.744	96,59

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							Pembangunan Industri			
6	Indeks Gini	Nilai	0,319	0,324	98,43	1	Program Pemberdayaan Sosial	108.132.000	106.805.400	98,77
						2	Program Rehabilitasi Sosial	2.053.851.135	1.940.674.727	94,49
						3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	136.585.000	132.123.100	96,73
						4	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	55.382.700	53.749.795	97,05
						6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.681.755.100	1.480.121.212	88,01
						7	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	250.615.000	250.615.000	100,00
						9	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000	99,17
						10	Program Pengelolaan Pendidikan	89.418.823.517	87.009.614.421	97,31
						11	Program Penyelenggaraan Jalan	40.151.902.662	20.864.655.730	51,96
						12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	168.978.285.492	150.494.322.216	89,06
						13	Program Perekonomian Dan Pembangunan	962.146.300	741.344.671	77,05
						14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	679.860.000	679.375.102	99,93
						15	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	20.790.000	18.690.000	89,90
						16	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.922.917.000	1.857.398.744	96,59
7	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	17,02	17,758	104,34	1	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	16.165.000	13.762.000	85,13

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
						3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000	99,17
						4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.922.917.000	1.857.398.744	96,59
						5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.466.904.900	5.247.411.965	95,99
						6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	460.240.700	429.431.580	93,31
						7	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	153.796.000	142.827.000	92,87
						8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.681.571.800	9.959.545.975	93,24
						9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.450.320.580	4.548.947.646	70,52
8	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,97	69,20	98,90	1	Program Pengelolaan Pendidikan	89.418.823.517	87.009.614.421	97,31
						2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.662.962.100	8.914.490.506	92,25
						3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	168.978.285.492	150.494.322.216	89,06
						4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.569.018.000	22.707.407.898	82,37
						5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.415.126.494	1.021.719.860	72,20
						6	Program Pengendalian Penduduk	1.730.898.600	1.730.818.800	100,00
						7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.894.855.000	1.675.564.318	88,43
						8	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	16.165.000	13.762.000	85,13
						10	Program Pengembangan Ekonomi	219.245.600	217.418.000	99,17

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
9	Prevalensi Stunting	Persen	30	31,1	96,33	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	168.978.285.492	150.494.322.216	89,06
						2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.415.126.494	1.021.719.860	72,20
						3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	692.649.000	493.570.336	71,26
						4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.569.018.000	22.707.407.898	82,37
						5	Program Pengendalian Penduduk	1.730.898.600	1.730.818.800	100,00
						6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.894.855.000	1.675.564.318	88,43
						7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.533.135.000	1.532.610.002	99,97
						8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.102.265.318	11.426.088.612	87,21
						9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	6.420.980.000	5.999.735.099	93,44
						10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.882.459.000	1.848.899.157	98,22
						11	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	650.621.200	630.751.091	96,95
						12	Program Pengawasan Keamanan Pangan	62.469.400	42.661.600	68,29
10	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,5	16,09	102,48	1	Program Pemberdayaan Sosial	108.132.000	106.805.400	98,77
						2	Program Rehabilitasi Sosial	2.053.851.135	1.940.674.727	94,49
						3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	136.585.000	132.123.100	96,73
						4	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						5	Program Pengembangan Kawasan	55.382.700	53.749.795	97,05

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							Transmigrasi			
						6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.294.943.600	1.293.681.330	30,12
						7	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	16.165.000	13.762.000	85,13
						9	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000	99,17
						10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.466.904.900	5.247.411.965	95,99
						11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	460.240.700	429.431.580	93,31
						12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	153.796.000	142.827.000	92,87
						13	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.681.571.800	9.959.545.975	93,24
						14	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.450.320.580	4.548.947.646	70,52
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,1	3,32	92,90	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.681.755.100	1.480.121.212	88,01
						2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.100.000	2.100.000	100,00
						3	Program Penempatan Tenaga Kerja	202.045.700	189.253.475	93,67
						4	Program Hubungan Industrial	682.732.500	674.178.231	98,75
						5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.387.700	1.500.000	8,63
						6	Program Pelayanan Penanaman Modal	834.110.100	766.570.923	91,90
						7	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	154.135.000	81.520.000	52,89
						8	Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096	99,29
						9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	16.165.000	13.762.000	85,13

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							(UMKM)			
						10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000	99,17
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	86	85,86	99,84	1	Program Penyelenggaraan Jalan	40.151.902.662	20.864.655.730	51,96
						2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.294.943.600	1.293.681.330	30,12
						3	Program Pengelolaan Pelayaran	100.106.700	30.505.393	30,47
						4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	799.098.147	540.004.811	67,58
						5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.102.265.318	11.426.088.612	87,21
						6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	6.420.980.000	5.999.735.099	93,44
						7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	383.860.000	380.946.278	99,24
						8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	514.843.300	457.803.366	88,92
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70	68,91	98,44	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	1.221.282.900	1.153.919.565	94,48
						2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	630.626.300	539.002.897	85,47
						3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	613.071.705.311	580.538.052.012	94,69
						4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.723.555.000	1.128.911.682	65,50
						5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	355.225.000	220.126.500	61,97
						6	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	132.473.604	91.757.800	69,26
						7	Program Penyelenggaraan Statistik	39.584.800		84,06

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							Sektoral		33.274.402	
						8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	187.448.000	154.934.100	82,65
						9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.720.000	54.327.600	92,52
						10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	236.303.909.698	211.002.179.748	89,29
						11	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	43.528.500	40.928.800	94,03
						12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.552.324.300	1.427.869.316	91,98
						13	Program Pengelolaan Arsip	150.441.100	145.054.900	96,42
						14	Program Kepegawaian Daerah	2.140.957.700	1.608.800.442	75,14
						15	Program Perekonomian Dan Pembangunan	962.146.300	741.344.671	77,05
						16	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.679.692.800	5.214.707.774	91,81
14	Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan	Persen	18,57	21,79	117,34	1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.216.639.800	1.708.507.344	77,08
						2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	236.303.909.698	211.002.179.748	89,29
						3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.387.700	1.500.000	8,63
						4	Program Pelayanan Penanaman Modal	834.110.100	766.570.923	91,90
						5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	154.135.000	81.520.000	52,89
						6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	933.708.100	832.013.518	89,11
						7	Program Pemasaran Pariwisata	123.571.500	114.985.900	93,05
						8	Program Penataan Bangunan Gedung	660.194.100	607.559.800	92,03
15	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Nilai	28	16,28	58,14	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	13.646.000	13.259.700	97,17
						2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	115.788.000	111.571.200	96,36
						3	Program Pengelolaan Keanekaragaman	115.736.900	110.183.000	95,20

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		% Capaian	Program		Anggaran		% Capaian
			Target 2025	Realisasi 2025				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*
							Hayati (KEHATI)			
						4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.846.900	41.602.500	90,74
						5	Program Pengelolaan Persampahan	9.079.470.000	9.056.137.246	99,74

Sumber : Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda dari PD terkait

Berikut secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan program yang mendukung pencapain kinerja indikator kinerja Utama (IKU**)** yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

tabel 2.3.27
Realisasi anggaran berdasarkan program Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.129.030.700	2.079.247.864
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.381.917.000	11.619.874.700
Program Hubungan Industrial	682.732.500	674.178.231
Program Kepegawaian Daerah	2.140.957.700	1.608.800.442
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	630.626.300	539.002.897
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	77.748.800	61.428.300
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.681.755.100	1.480.121.212
Program Pelayanan Penanaman Modal	834.110.100	766.570.923
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	198.435.000	161.608.200
Program Pemasaran Pariwisata	123.571.500	114.985.900
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	234.400.900	228.973.545

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.070.000	2.070.000
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.533.135.000	1.532.610.002
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	252.231.000	240.638.261
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	502.544.800	501.860.843
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.415.126.494	1.021.719.860
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.416.855.700	1.390.234.000
Program Pemberdayaan Sosial	108.132.000	106.805.400
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	16.165.000	13.762.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	166.056.800	149.488.900
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	72.097.500	69.943.900
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.894.855.000	1.675.564.318
Program Pembinaan Perpustakaan	1.089.560.460	570.762.578
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	168.978.285.492	150.494.322.216
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.679.692.800	5.214.707.774
Program Penanganan Bencana	225.323.750	218.067.000
Program Penanganan Kerawanan Pangan	69.079.000	59.920.000
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	44.710.000	9.355.000
Program Penanggulangan Bencana	565.094.500	535.095.193
Program Penataan Bangunan Gedung	660.194.100	607.559.800
Program Penataan Desa	215.469.900	211.444.703
Program Pencatatan Sipil	161.874.600	145.443.800
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	686.641.400	668.473.505

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Penyelamatan Non Kebakaran		
Program Pendaftaran Penduduk	406.647.500	393.918.327
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.662.962.100	8.914.490.506
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.044.461.900	1.024.345.679
Program Penempatan Tenaga Kerja	202.045.700	189.253.475
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	334.007.500	296.130.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	62.469.400	42.661.600
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.552.324.300	1.427.869.316
Program Pengelolaan Arsip	150.441.100	145.054.900
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.960.766.100	2.704.553.997
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.420.980.000	5.999.735.099
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	383.860.000	380.946.278
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.102.265.318	11.426.088.612
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	182.213.400	145.031.600
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43.770.403	43.425.800
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	43.528.500	40.928.800
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	115.736.900	110.183.000
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	236.303.909.698	211.002.179.748
Program Pengelolaan Pelayaran	100.106.700	30.505.393
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.216.639.800	1.708.507.344
Program Pengelolaan Pendidikan	89.418.823.517	87.009.614.421
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	460.240.700	429.431.580
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.466.904.900	5.247.411.965
Program Pengelolaan Persampahan	9.079.470.000	9.056.137.246
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	76.989.600	57.202.801
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.294.943.600	1.293.681.330

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	219.245.600	217.418.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	17.387.700	1.500.000
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.066.212.500	586.508.214
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.486.379.800	1.155.993.911
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	204.166.400	89.277.500
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000	350.000.000
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	55.382.700	53.749.795
Program Pengembangan Kebudayaan	1.898.440.200	1.802.718.737
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	142.315.000	141.896.100
Program Pengembangan Perumahan	850.741.700	453.154.958
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.720.000	54.327.600
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	296.180.900	295.797.000
Program Pengembangan UMKM	1.645.265.800	1.633.599.096
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	45.846.900	41.602.500
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	306.854.500	133.669.480
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	92.742.800	53.384.200
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.763.275.300	1.707.472.829
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	154.135.000	81.520.000
Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	115.788.000	111.571.200
Program Pengendalian Penduduk	1.730.898.600	1.730.818.800
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	153.796.000	142.827.000
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	588.203.400	577.621.948
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	6.300.000	6.250.000
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	933.708.100	832.013.518

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	650.621.200	630.751.091
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	27.569.018.000	22.707.407.898
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	11.631.600	11.466.000
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.602.197.910	1.565.131.370
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	352.200.000	344.910.000
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.466.865.000	1.452.590.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.931.898.200	6.261.311.111
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	250.615.000	250.615.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	613.071.705.311	580.538.052.012
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.450.320.580	4.548.947.646
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.681.571.800	9.959.545.975
Program Penyelenggaraan Jalan	40.151.902.662	20.864.655.730
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	799.098.147	540.004.811
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	187.448.000	154.934.100
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	514.843.300	457.803.366
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.723.555.000	1.128.911.682
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	39.584.800	33.274.402
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	940.117.800	893.768.900
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	86.575.600	83.884.000
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	53.436.800	53.100.000
Program Penyuluhan Pertanian	1.910.976.900	1.238.869.240
Program Perekonomian dan Pembangunan	962.146.300	741.344.671
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.922.917.000	1.857.398.744

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	13.646.000	13.259.700
Program Perencanaan Tenaga Kerja	2.100.000	2.100.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.221.282.900	1.153.919.565
Program Perizinan Usaha Pertanian	10.372.800	9.412.800
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	136.585.000	132.123.100
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	132.473.604	91.757.800
Program Perlindungan Khusus Anak	93.280.000	80.936.983
Program Perlindungan Perempuan	81.968.000	70.795.400
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.882.459.000	1.848.899.157
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	355.225.000	220.126.500
Program Rehabilitasi Sosial	2.053.851.135	1.940.674.727
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	692.649.000	493.570.336
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	679.860.000	679.375.102
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	20.790.000	18.690.000
Grand Total	**1.331.846.765.781**	**1.209.222.941.389**

Sumber : BKAD Kab.Manggarai Barat Tahun 2025

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Mantriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Kementerian Transmigrasi RI	DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-152.03.4.691670/2025	**1. Program Transmigrasi**	Manggarai Barat	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat	**1.081.020.000**	**1.080.039.494**	**99,91**		**100**	
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi			**1.081.020.000**	**1.080.039.494**	**99,91**	Terlaksananyanya pembangunan di kawasan Transmigrasi	**100**	
		Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Transmigrasi			1.081.020.000	1.080.039.494	99,91	Terlaksananya pembangunan fasilitas umum di kawasan Transmigrasi	100	
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.020.000	680.000	66,67	Terlaksananya belanja perjalanan dinas biasa guna menunjang pelaksanaan program transmigrasi	100	
		- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah			1.080.000.000	1.079.359.494	99,94	Terlakasananya belanja gedung dan bangunan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	100	
		a) Pembangunan Toilet Sekolah dan SAB Sekolah di Kawasan Komodo-Sano Nggoang (SDI Lengkong Mbot)			200.000.000	199.919.334	99,96	Terlaksananya pembangunan toilet sebanyak 1 unit	100	
		b) Supervisi Pembangunan Toilet Sekolah SAB Sekolah dan Rehab Sekolah di Komodo-Sano Nggoang			80.000.000	79.804.560	99,76	Tersedianya dokumen supervisi pembangunan toilet sekolah dan rehab sekolah	100	

			c) Rehab Sekolah di Kawasan Komodo-Sano Nggoang (SDI Macan Tanggar)			200.000.000	199.888.513	99,94	Terlaksananya pembangunan Rehab Sekolah sebanyak 1 unit	100	
			d) Pembangunan Toilet Sekolah dan SAB Sekolah di Kawasan Komodo-Sano Nggoang (SDI Macan Tanggar)			200.000.000	199.900.000	99,95	Terlaksananya pembangunan Toilet sebanyak 1 unit	100	
			e) Pembangunan Toilet Sekolah dan SAB Sekolah di Kawasan Komodo-Sano Nggoang (SDN Nanganae)			200.000.000	199.947.087	99,97	Terlaksananya pembangunan Toilet sebanyak 1 unit	100	
			f) Rehab Sekolah di Kawasan Komodo-Sano Nggoang (SMPN 4 Komodo)			200.000.000	199.900.000	99,95	Terlaksananya Pembangunan Rehab Sekolah sebanyak 1 unit	100	
		2.	**Program Dukungan Manajemen**			**73.080.000**	**63.748.922**	**87,23**		100	
			Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			73.080.000	63.748.922	87,23	Terlaksananya dukungan manajemen pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	100	
			Layanan Dukungan Manajemen Internal			73.080.000	63.748.922	87,23	Terlaksananya dukungan manajemen internal	100	
			- Belanja Bahan	Manggarai Barat	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat	1.000.000	1.000.000	100	Terlaksananya belanja bahan	100	
			- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			17.880.000	16.851.622	94,25	Terlaksananya belanja perjalanan dinas biasa untuk mendukung peembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	100	
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.360.000	1.360.000	100	Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam kota untuk mendukung peembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	100	
Jumlah						**1.154.100.000**	**1.143.788.416**	**99,11**		**100**	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak menerima pendelegasian tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Permasalahan dan Kendala.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2025, tidak adanya hambatan/permasalahan dalam pelaksanaannya.

3.4 Saran Dan Tindak Lanjut

Secara keseluruhan, pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Transmigrasi RI di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 berjalan sangat baik dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi anggaran mencapai 99,11%. Meskipun dinyatakan tidak ada kendala berarti, beberapa poin berikut dapat dijadikan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan di periode mendatang:

A. Saran

1. **Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset**: Mengingat realisasi fisik pembangunan fasilitas umum (Toilet Sekolah, SAB, dan Rehab Sekolah) telah mencapai 100%, disarankan agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah terkait untuk memastikan aset tersebut dimanfaatkan secara optimal
2. **Ketepatan Administrasi Penyerahan Aset:** Terkait realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 99,94%, disarankan agar proses administrasi serah terima hibah aset dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dilakukan

tepat waktu agar pencatatan aset di neraca daerah menjadi akurat.

3. **Optimalisasi Anggaran Operasional:** Terdapat beberapa rincian belanja seperti Perjalanan Dinas Biasa (Program Transmigrasi) yang realisasinya hanya 66,67%. Ke depan, perencanaan anggaran operasional perlu lebih dipertajam agar selisih (silpa) antara alokasi dan realisasi tidak terlalu lebar.

B. Tindak lanjut

1. **Proses Serah Terima (BAST):** Melaksanakan koordinasi aktif dengan Kementerian Transmigrasi untuk penyelesaian Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan tahun 2025 agar aset bangunan sekolah dan fasilitas sanitasinya dapat segera tercatat sebagai kekayaan daerah/milik sekolah
2. **Monitoring Pasca-Konstruksi:** Melakukan monitoring rutin terhadap kualitas fisik bangunan yang telah direhabilitasi (seperti di SDI Lengkong Mbot, SDI Macan Tanggar, SDN Nanganae, dan SMPN 4 Komodo) untuk memastikan tidak ada kerusakan dini setelah masa pemeliharaan berakhir.
3. **Pengusulan Program Berkelanjutan:** Berdasarkan keberhasilan capaian 100% fisik tahun ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu menyusun proposal usulan baru atau keberlanjutan program untuk tahun anggaran berikutnya guna mempercepat pemerataan infrastruktur di kawasan transmigrasi lainnya
4. **Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor:** Meningkatkan koordinasi antara Dinas Nakertrans dengan Dinas PUPR atau Dinas Pendidikan dalam hal standarisasi teknis bangunan sekolah di wilayah transmigrasi agar hasil pembangunan selalu sesuai dengan standar nasional yang berlaku

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pendidikan Anak Usia Dini: Usia 5 (lima) s/d 6 (enam) tahun.
- Pendidikan Dasar: Usia 7 (tujuh) s/d 15 (lima belas) tahun.
- Pendidikan Kesetaraan: Usia 7 (tujuh) s/d 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

Pencapaian SPM Pendidikan oleh Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2025	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2025
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%		
3.	Pendidikan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang	100%	Jumlah barang, jasa dan	100%

	Kesetaraan	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		sumber daya manusia	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%		

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

4.1.3 Realisasi.

Realisasi capaian SPM bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	**Pendidikan Anak Usia Dini**		**Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	11.689	7.216	4.473	61,73%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	45,79	44,43	1,36	97,03
	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	79,81	81,65	-1,84	102,31

2.	**Pendidikan Dasar**		**Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	50.139	49.081	1.058	97,88%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	SEKOLAH DASAR					
	Kemampuan Literasi	Nilai	53,96	57,28	-3,32	106,15
	Kemampuan Numerasi	Nilai	49,5	53,45	3,95	107,98
	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	77,52	76,62	0,9	98,84
	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	74,81	73,81	1	98,66
	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	62,89	60,39	2,5	96,02
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA					
	Kemampuan Literasi	Nilai	63,13	60,9	2,23	96,47
	Kemampuan Numerasi	Nilai	58,82	58,56	0,26	99,56
	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	72,74	71,23	1,51	97,92
	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	74,21	73,2	1,01	98,64
	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	61,76	59,35	2,41	96,10
3.	**Pendidikan Kesetaraan**		**Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	1.596	1.096	500	68,67

	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Angka Partisipasi Sekolah	%	14,38	10,66	3,72	74,31

Sumber: Rapor Pendidikan tahun anggaran 2025

4.1.4 Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Sub Kegiatan	Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
PENDIDIKAN PAUD				
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp. 5.152.610.000,-	Rp. 4.956.929.165,-	96,20%
2.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 162.036.700,-	Rp. 124.954.482,-	77,11%
3.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 250.000.000,-	Rp. 249.592.618,-	99,84%
4.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 269.900.000,-	Rp. 269.838.000,-	99,98%
5.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp. 892.854.000,-	Rp. 826.285.606,-	92,54%
6.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 736.492.300,-	Rp. 733.465.041,-	99,59%
7.	Sosialisasi dan	Rp. 77.874.000,-	Rp. 64.500.922,-	82,83%

	Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
8.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp. 348.197.086,-	Rp. 347.765.958,-	99,88%
9.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 93.592.500,-	Rp. 87.070.400,-	93,03%
10.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 76.720.900,-	Rp. 76.570.900,-	99,80%
PENDIDIKAN DASAR				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)			
1.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Rp.31.302.478.607,-	Rp.30.253.718.587,-	96,65%
2.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 137.658.300,-	Rp. 136.118.750,-	98,88%
3.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 330.000.000,-	Rp. 330.000.000,-	100%
4.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 1.531.021.900,-	Rp. 1.396.946.626,-	91,24%
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 4.385.992.500,-	Rp. 4.002.279.914,-	91,25%
6.	Pengadaan Alat Praktik	Rp. 2.342.395.800,-	Rp. 2.231.298.119,-	95,26%

	dan Peraga Peserta Didik			
7.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp.184.480.600,-	Rp. 157.625.720,-	85,44%
8.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp. 260.426.300,-	Rp. 247.900.078,-	95,19%
9.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 375.384.400,-	Rp. 247.900.078,-	95,19%
10.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 174.243.200,-	Rp. 171.208.200,-	98,26%
11.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Rp. 90.756.600,-	Rp. 84.128.900,-	92,70%
12.	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp. 950.000.000,-	Rp. 942.974.970,-	99,26%
13.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 1.193.344.733,-	Rp. 1.157.419.860,-	96,99%
14.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 2.237.534.250,-	Rp. 2.233.725.112,-	99,83%
15.	Pembangunan Ruangan Unit Kesehatan Sekolah	Rp. 1.380.788.272,-	Rp. 1.336.947.898,-	96,82%
16.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Rp. 4.763.391.558,-	Rp. 4.612.093.693,-	96,82%

	Sekolah/TU			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp. 648.729.900,-	Rp. 645.720.051,-	99,54%
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 1.249.990.557,-	Rp. 1.234.873.455,-	98,79%
3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp.17.978.080.723,-	Rp.17.336.933.802,-	96,43%
4.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 179.846.200,-	Rp. 132.220.600,-	73,52%
5.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 993.300.000,-	Rp. 992.180.601,-	99,89%
6.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 362.000.000,-	Rp. 362.000.000,-	100%
7.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp. 2.786.480.000,-	Rp.2.639.461.313,-	94,72%
8.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp. 79.681.300,-	Rp. 70.501.300,-	88,48%
9.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp. 258.976.000,-	Rp. 186.242.750,-	71,92%
10.	Pembinaan	Rp. 260.719.600,-	Rp. 56.000.232,-	21,48%

	Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
11.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp. 483.501.500,-	Rp. 468.631.811,-	96,92%
12.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 250.000.000,-	Rp. 468.631.811,-	96,92%
13.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 1.190.246.731,-	Rp.1 107.412.925,-	93,04%
14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp. 800.000.000,-	Rp. 793.957.470,-	99,24%
15.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 89.307.100,-	Rp. 57.787.100,-	64,71%
16.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Rp. 145.179.500,-	Rp.137.943.896,-	95,02%
17.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 109.150.500,-	Rp. 69.094.000,-	63,30%
PENDIDIKAN KESETARAAN				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes	Rp. 688.430.900,-	Rp. 511.092.680,-	74,24%

	etaraan			
2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 8.974.531.200,-	Rp. 8.403.397.826,-	93,24%
3.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp. 995.900.000,-	Rp. 792.599.000,-	79,59%
4.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp. 117.337.700,-	Rp. 94.359.700,-	80,42%
5.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp. 568.836.600,-	Rp. 533.994.600,-	93,87%

Sumber: LRA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025

4.1.5 Permasalahan Dan Solusi.

- Lemahnya Sinkronisasi Data (Dapodik: keterlambatan input data ke sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) membuat perencanaan pemenuhan SPM menjadi tidak akurat.
- Kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap validitas data yang dikirimkan oleh satuan pendidikan.
- Banyak sekolah yang secara administratif tercatat ada, namun secara fisik tidak memenuhi standar pelayanan minimal
- Banyak daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah sangat bergantung pada dana transfer pusat, yang terkadang pencairannya tidak tepat waktu.

- Adanya benturan kepentingan antara pemenuhan SPM Pendidikan dengan sektor infrastruktur atau belanja pegawai lainnya di tingkat daerah

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- Pelayanan kesehatan Ibu bersalin.
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- Pelayanan kesehatan balita.
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

Pencapaian SPM Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2025	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2025
1.	Pelayanan Kesehatan	jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata	100%

	ibu hamil	kesehatan		Cara Pemenuhan	
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	jumlah layanan hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
11.	Pelayanan kesehatan	jumlah orang terduga TBC mendapatkan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya	100%

	orang terduga tuberculosis	pelayanan TBC sesuai standar		manusia dan Tata Cara Pemenuhan	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)	jumlah pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100 %

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

4.2.3 Realisasi.

Realisasi capaian SPM bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	**Pelayanan Kesehatan ibu hamil**		**jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	6.127	3.858	2.269	62,96 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	602	482	120	80,07%

	Tablet tambah darah	Tablet	866.160	694.440	171.720	80,17
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	26	26	0	100%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	26	26	0	100%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	26	26	0	100%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket	26	26	0	100%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	26	26	0	100%
	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	26	26	0	100%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4812	3858	954	80,17%
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100%
	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	26	26	0	100%
	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis	Orang	26	26	0	100%

	obstetri dan ginekologi;					
	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga Kesehatan: bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	4812	3858	954	80,17%
2.	**Pelayanan Kesehatan ibu bersalin**		**jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	4511	4.462	49	98,91 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Formulir Partograf	Formulir	4812	4507	305	93,66 %
	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	26	26	0	100 %
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4812	4507	305	93,66 %
	Media promosi	Paket	1	1	0	100%

	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					
	Tenaga Medis Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	26	26	0	100 %
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	532	532	0	100 %
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	26	26	0	100 %
	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100 %
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan		4670	4517	153	96,72 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe	Vaksin	4502	4517	66	98,56 %
	Vitamin K1 injeksi	Ampul	1528	1507	21	96,63%
	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4583	4517	66	98,56%
	Formulir bayi baru lahir	Formulir	1	1	0	100%
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi	Orang	1	1	0	100%

	Muda (MTBM)					
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	4583	4517	66	98,56%
	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100%
	Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Kader Kesehatan	Orang	2152	2152	0	100%
4.	**Pelayanan kesehatan Balita**		**jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	18.362	18.362	0	100 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau	Dokumen	1	1	0	100%

	instrumen standar lain yang berlaku					
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	1	1	0	100%
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18362	18362	0	100%
	Vitamin A Biru	Kapsul	4583	4015	568	87,61%
	Vitamin A Merah	Kapsul	13779	16376	-2597	118,85 %
	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	2296	1630	666	70,99%
	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	Vaksin	2296	1696	327	85,76%
	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	2296	1316	980	57,32%
	Vaksin Imunisasi Dasar DPT-HB-HIB	Vaksin	2296	2095	201	91,25%
	Vaksin Imunisasi Dasar : Campak Rubella	Vaksin	2296	1594	702	69,43%
	Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT-HB-HIB	Vaksin	2296	1572	724	68,47%
	Vaksin Imunisasi Lanjutan: Campak Rubella	Vaksin	2296	1678	618	73,08%
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	18362	18362	0	100%
	Peralatan Anafilaktik	Paket	26	26	0	100%
	Tenaga Medis: Dokter	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	488	488	0	100%

	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Guru PAUD	Orang	26	26	0	100%
	Kader Kesehatan	Orang	2512	2512	0	100%
5.	**Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**		**jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	41.552	41.552	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	1	1	0	100 %
	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	1	1	0	100 %
	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia	Dokumen	1	1	0	100%

	pendidikan dasar)					
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	1	1	0	100 %
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100%
	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok	Tablet	1537276	54992	1482284	3,58

	opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)					
	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	26	26	0	100%
	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	2124	2113	11	99,48
	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat	Paket	1	1	0	100%
	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	2105	2227	-112	105,8
	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan:	Orang	488	488	0	100%

	Perawat					
	Tenaga Kesehatan: gizi	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	2512	2512	0	100%
	Tenaga non kesehatan : Guru (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas pendidikan)	Orang	26	26	0	100%
6.	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**		**jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	170.186	120.136	50.050	70,59%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100%
	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	26	26	0	100%

	Alat : Tensimeter	Unit	26	26	0	100%
	Alat : Glukometer	Unit	26	26	0	100%
	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	26	26	0	100%
	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	26	26	0	100%
	KIT IVA Tes	Unit	22	22	0	100%
	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	169577	83876	85701	149,46 %
	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	26	26	0	100%
	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	26	26	0	100%
	Alat Pelayanan KB	Unit	26	26	0	100%
	Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	26	26	0	100%
	Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	26	26	0	100%
	Vasectomi Set	Unit	1	1	0	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	26	26	0	100%
	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	16958	16958	0	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	532	532	0	100%

	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100%
	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	26	26	0	100%
7.	**Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**		**jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	20.354	17.737	2.617	87,14%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	26	26	0	100%
	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	26	26	0	100%
	Alat Pemeriksaan Kolesterol	Paket	26	26	0	100%
	Bahan medis Habis Pakai: strip uji	Paket	26	26	0	100%

	pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol					
	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	26	26	0	100%
	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	1	1	0	100%
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100%
	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	26	26	0	100%
8.	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**		**jumlah layanan hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar**			
	Presentase Pencapaian		**Jumlah yang harus**	**Jumlah yang**	**Jumlah yang**	

	Penerima Layanan Dasar		**dilayani**	**terlayani**	**belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	13.165	15.682	2.517	83,95%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	1	1	0	100%
	Obat Hipertensi	Paket	1	1	0	100%
	Tensimeter	Unit	26	26	0	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	0	100%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	26	26	0	100%

	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26	26	0	100%
9.	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**		**jumlah Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan		3.920	2.569	1.351	65,53%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Obat Diabetes Melitus	Paket	1	1	0	100%
	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	26	26	0	100%
	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	26	26	0	100%

	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100%
	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	1	1	0	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga Gizi	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	26	26	0	100%

10.	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**		**jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	799	730	69	91,36%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia**	
	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	1	1	0	100%
	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	1	1	0	100%
	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1	1	0	100%
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem	Formulir	1	1	0	100%

	informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)					
	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	media	1	1	0	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga profesional lainnya	Orang	26	26	0	100%
11.	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**		**jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	1.927	1.925	2	99,90%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100%
	Reagen Zn TB	Paket	220	50	170	22,73%

	Masker bedah dan Masker N95	Paket	1	1	0	100%
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	1	1	0	100%
	Catridge tes cepat molekuler	Paket	1927	1927	0	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1	1	0	100%
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100%
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	1	1	0	100%
	Kader Kesehatan	Orang	2512	2512	0	100%
12.	**Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh**		**jumlah pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh**			

	manusia (human Immunodeficiency Virus)					
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	5.598	5.426	172	96,93%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	1	1	0	100%
	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	7	7	0	100%
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	1	1	0	100%
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	1	1	0	100%
	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter	Orang	26	26	0	100%

	spesialis kulit dan kelamin					
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	488	488	0	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	532	532	0	100%
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	26	26	0	100%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	0%

Sumber: Capaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2025

4.2.4 Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp. 7.774.057.600,-**	**Rp. 6.814.066.575,-**	87,65%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 1.781.597.000,-	Rp.1.544.269.475,-	86,68%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 536.000.000,-	Rp. 345.680.000,-	64,49%
	Pengelolaan Pelayanan	Rp. 239.990.000,-	Rp. 234.330.000,-	97,64%

	Kesehatan Balita			
	Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir	Rp. 2.729.755.000,-	Rp. 2.563.846.500,-	93,92%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 947.500.000,-	Rp. 846.100.000,-	89,30%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 163.440.000,-	Rp. 142.360.000,-	87,10%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 451.220.000,-	Rp. 338.980.000,-	75,13%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 464.410.000,-	Rp. 413.030.000,-	88,94%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 384.000.000,-	Rp. 316.900.000,-	82,94%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan RisikoTerinfeksi HIV	Rp. 76.145.600,-	Rp. 68.570.600,-	90,05%

Sumber: LRA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025

4.2.5 Permasalahan Dan Solusi.

- Kesenjangan Anggaran dan Fiskal Daerah yang mana daerah masih bergantung pada Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbatas
- Data Sasaran (Denumerator): Sering terjadi perbedaan data antara jumlah penduduk riil di lapangan dengan data proyeksi BPS atau data Dukcapil;
- Aplikasi pelaporan yang belum terintegrasi sepenuhnya (e-SPM) terkadang mengalami kendala teknis atau penginputan yang terlambat dari tingkat akar rumput.
- SPM Kesehatan sering dianggap hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. Padahal, banyak indikator yang memerlukan peran sektor lain misalnya Akses jalan menuju fasilitas kesehatan (Dinas PU), Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri (Camat, Desa, dan tokoh masyarakat). Ketersediaan sanitasi yang layak sebagai pencegahan penyakit;
- Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Labuan Bajo), mobilitas penduduk sangat tinggi. Banyak warga dari luar daerah yang tinggal sementara namun memerlukan layanan kesehatan, yang terkadang tidak tercatat dalam data sasaran awal (BPS/Dukcapil), sehingga mengacaukan perhitungan cakupan riil;
- Perbedaan data antara laporan manual Puskesmas dengan aplikasi e-SPM seringkali memerlukan rekonsiliasi yang memakan waktu lama;
- Dengan banyaknya agenda pembangunan daerah, alokasi anggaran untuk operasional pelayanan preventif (pencegahan) terkadang harus berkompetisi dengan kebutuhan infrastruktur fisik atau belanja wajib lainnya.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

  Penerima pelayanan dasar adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

  Penerima pelayanan dasar adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.

Pencapaian SPM Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2025	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2025
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Jumlah barang dan jasa	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	Jumlah barang dan jasa	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

4.3.3 Realisasi.

Realisasi capaian SPM bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**		**Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	1339	1339	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Jaringan Perpipaan					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	297	297	0	100%
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	297	297	0	100%

	(sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)					
	Bukan Jaringan Perpipaan					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
2.	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**		**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	2640	2509	131	95,04%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses	Rumah Tangga	547	547	0	100%

	pengolahan Air Limbah Domestik					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	547	547	0	100%
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	117	117	0	100%
	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi	Rumah Tangga	427	427	0	100%

	kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

4.3.4 Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp. 19.532.245.318,-**	**Rp. 17.425.823.711,-**	**89,26 %**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp. 242.340.000,-	Rp. 84.000.000,-	34,66%
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp. 23.490.000,-	Rp. 15.000.000,-	63,86%
2.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota**	**Rp. 6.420.980.000,-**	**Rp. 5.999.753.099**	**93,44%**
	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp. 1.197.810.000,-	Rp. 811.054.099,-	67.71%
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp. 5.223.170.000,-	Rp. 5.188.681.000,-	99,34%

Sumber: LRA Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

4.3.5 Permasalahan Dan Solusi.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali tidak mampu mencakup seluruh wilayah dalam Pembangunan SPAM dan SPALD
- Banyak daerah mampu membangun fisik, namun gagal mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin, sehingga aset cepat rusak sebelum mencapai target pelayanan maksimal.
- erubahan iklim dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan sumber air baku berkurang saat musim kemarau atau tercemar saat musim hujan.
- Untuk wilayah yang tidak terjangkau pipa limbah, layanan penyedotan lumpur tinja secara berkala masih terkendala armada yang terbatas dan akses jalan yang sempit di beberapa pemukiman padat.
- Beberapa sumber mata air yang menjadi andalan sistem perpipaan mengalami penurunan debit, terutama saat musim kemarau panjang, sehingga pelayanan air minum tidak bisa dilakukan 24 jam (tidak memenuhi standar kontinuitas SPM).

4.4 Urusan Perumahan Rakyat.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.

Pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2025	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2025
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Jumlah barang dan jasa	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Jumlah barang dan jasa	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

4.4.3 Realisasi.

Realisasi capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota**		**Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana	Tidak Terjadi Bencana

	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia**	
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)		1	1	0	100%
2.	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**		**Jumlah warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	Tidak ada Program Relokasi	Tidak ada Program Relokasi	Tidak ada Program Relokasi	Tidak ada Program Relokasi
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia**	
	Jika tidak ada relokasi program pemerintah maka harus mengupload Melakukan	Rumah	1	1	0	100%

	pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)					

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

4.4.4 Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Rp. 25.080.800,-**	**Rp. 23.875.000,-**	**95,19%**
	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Rp. 25.080.800,-	Rp. 23.875.000,-	95,19%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Rp. 825.660.900,-**	**Rp. 429.279.958,-**	**51,99%**
	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Rp. 825.660.900,-	Rp. 429.279.958,-	51,99%

Sumber: LRA Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

4.4.5 Permasalahan Dan Solusi.

- kesulitan dalam membedakan urusan BPBD dan Dinas Perumahan dalam melaksanakan pengadaan rumah layak huni korban bencana;
- tidak adanya anggaran untuk relokasi program Pemerintah sedangkan perencanaan/lahan serta daftar penerima relokasi sdh disiapkan;
- Kesulitan Pemerintah daerah memenuhi persyaratan Pemerintah Pusat untuk penyediaan anggaran DAK program relokasi Pemerintah yaitu menganggarkan DAU pembuatan tanggul/tembok penahan pada lahan tora yang direncanakan program relokasi Pemerintah.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

  Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota.
- Pelayanan Informasi rawan Bencana.

  Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.

  Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan tempat terjadinya bencana.

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran.
  Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.

Target Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2025	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2025
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/kota	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi Rawan Bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

4.5.3 Realisasi.

Realisasi capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/kota**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	311	308	3	99,04%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	24	24	0	100%
	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta	Dokumen	7	7	0	100%

	penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023					
	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	55	52	3	94,55%
	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	2	2	0	100%
2.	**Pelayanan Informasi rawan Bencana**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi Rawan Bencana**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	4635	4635	0	100%

	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana					
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Orang	2	2	0	100%
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3	Orang	3	3	0	100%
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100%
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	22	0	100%
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah					

	Rawan Bencana					
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eks	270	270	0	100%
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	3	3	0	100%
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100%
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9	9	0	100%
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	2	2	0	100%
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2	2	0	100%
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	0	100%

	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100%
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100%
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	27	27	0	100%
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	3	3	0	100%
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100%
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100%
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100%
3.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap**		**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**			

	bencana					
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	4.636	4.636	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	2	0	100%
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	2	2	0	100%
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100%
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100%
	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)					
	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi					
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					

	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	20	20	0	100%
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	100%
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	0	100%
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)					
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	c. Tersedianya Penyelenggara	Orang	1	1	0	100%

	simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)					
	2) Gladi Lapang					
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana					
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100%
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	12	12	0	100%
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	0	100%
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100%
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	1	6	14,29%
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	0	100%
	b. Tersedianya Sarpras	Unit	1	1	0	100%

	komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)					
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100%
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100%
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan					

	berbasis Masyarakat					
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu
	d. Tersedianya Peralatan	Unit	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu

	penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)					
4.	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	500	500	0	100 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Respon Cepat Darurat Bencana					
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Posko	20	19	1	95,00%
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	20	20	0	100%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan	Paket	1	1	0	100%

	kebutuhan)					
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	10	10	0	100%
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	0	100%
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100%
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100%
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	0	100%
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	Orang	4	4	0	100%

	(sesuai dengan kebutuhan)					
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	20	0	100%
5.	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran**		**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	51	51	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	23	23	0	100%

	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	dokumen	2	2	0	100%
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, … dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	Unit	19	19	0	100%
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	9	8	1	88,89%
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu
	Pelayanan penyelamatan	Layanan	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu

	dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					

Sumber: Satuan pol PP dan BPBD Tahun 2025

4.5.4 Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pelaksanaan Anggaran	Realisasi Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1.	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp. 1.602.197.910,-**	**Rp. 1.565.131.370,-**	**97,69%**
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Rp.56.681.200,-	Rp. 59.656.200,-	99,96%
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Rp. 385.300.000,-	Rp. 385.210.000,-	99,98%
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 1.157.216.710,-	Rp. 1.120.265.170,-	96,81%
2.	**Pelayanan**	**Rp.**	**Rp. 42.675.000,-**	99,52%

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**48.890.000,-**		
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Rp. 437.804.500,-	Rp. 418.100.193,-	95,50%
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Rp. 21.280.000,-	Rp. 18.120.000,-	85,15%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 48.000.000,-	Rp. 47.850.000,-	99,69%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Rp. 48.890.000,-**	**Rp. 42.675.000,-**	87,29%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 27.360.000,-	Rp. 26.750.000,-	97,77%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota	Rp.6.840.000,-	Rp. 6.825.000,-	99,78%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana Kabupaten/Kota	Rp.14.690.000,-	Rp. 9.100.000,-	61,95%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Rp. 9.120.000,-**	**Rp. 8.350.000,-**	**91,56%**
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 9.120.000,-	Rp. 8.350.000,-	91,56%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan PenangananBahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 686.641.400,-**	**Rp. 668.473.505,-**	**97,35%**
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.141.400,-	Rp. 91.151.000,-	91,02%

	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Rp. 586.500.000,-	Rp. 577.322.505 ,-	98,44%

Sumber: LRA Satpol PP dan BPBD Tahun Anggaran 2025

4.5.5 Permasalahan Dan Solusi.

- Kemampuan keuangan daerah yang terbatas menghambat pemenuhan sarana dan prasarana (seperti kendaraan operasional pemadam kebakaran atau alat pelindung diri Satpol PP).
- Kurangnya jumlah personil yang berstatus Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja atau Pemadam Kebakaran yang bersertifikat kompetensi.;
- Banyak daerah yang belum memiliki data *base line* yang akurat mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan (misal: jumlah penduduk di kawasan rawan bencana);
- Parameter keberhasilan SPM Trantibumlinmas seringkali bersifat kualitatif, sehingga sulit diukur secara presisi dalam laporan capaian kinerja tahunan.;
- Untuk daerah dengan topografi sulit atau kepulauan, *response time* (waktu tanggap) terhadap gangguan ketenteraman atau kebakaran sering kali sulit memenuhi standar yang ditetapkan (misalnya target 15 menit untuk pemadam kebakaran);

4.6 Urusan Sosial.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.

- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.

Pencapaian SPM Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2025	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dilluar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

4.6.3 Realisasi.

Realisasi capaian SPM bidang Sosial Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti**		**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	711	711	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Layanan data dan pengaduan	Orang	720	720	0	100%
	Penyediaan permakanan	Orang	430	430	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0	100%
	Penyediaan sandang	Orang	300	300	0	100%
	Penyediaan alat bantu	Orang	25	25	0	100%
	Penyediaan perbekalan	Orang	100	100	0	100%

	kesehatan					
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	Orang	200	200	0	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	25	25	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		10	9	1	90%
	Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100%
2.	**Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti**		**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	469	469	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Layanan data dan pengaduan	Orang	469	469	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	10	10	10	100%

	Penyediaan permakanan	Orang	425	425	0	100%
	Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	10	10	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	10	0	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	5	5	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	8	8	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100%
	Layanan Rujukan	Orang	1	1	0	100%
3.	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti**		**Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	

	Penerima Layanan	Orang	505	505	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Layanan data dan pengaduan	Orang	553	553	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	Penyediaan permakanan	Orang	500	452	48	90,40%
	Penyediaan sandang	Orang	100	100	0	100%
	Penyediaan alat bantu	Orang	25	25	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	40	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	50	50	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	5	5	0	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100%
	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	15	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	Orang	3	2	1	66,67%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	2	1	66,67%

	Layanan rujukan	Orang	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu	Tutup Mutu
4.	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti**		**Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dilluar panti**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	3	3	0	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Layanan data dan pengaduan	Orang	3	3	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	3	3	0	100%
	Penyediaan permakanan	Orang	3	3	0	100%
	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3	3	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3	3	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	0	0
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti	Orang	0	0	0	0

	dokumen kependudukan					
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan Keluarga	Orang	3	3	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100%
	Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100%
5.	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**		**Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat**			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum Terlayani**	
	Penerima Layanan	Orang	1083	1083	0	
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar		**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia**	
	Penyediaan permakanan	Orang	1083	1083	0	100%
	Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100%
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	50	50	0	100%
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	37	13	74%
	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1083	1083	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2025

4.6.4 Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Sosial Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Realisasi Anggaran (%)
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rp. 1.558.191.135,-**	**Rp. 1.448.524.727**	**93,16%**
	Penyediaan Permakanan	Rp. 710.421.400,-	Rp.695.232.000,-	97,86 %
	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 87.011.500,-	Rp. 83.195.000,-	95,61 %
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Rp. 125.710.000,-	Rp. 119.237.415,-	94,85 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Rp.435.615.000,-	Rp. 424.488.000,-	97,45%
	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Rp. 120.773.235,-	Rp. 72.842.472,-	60,31%
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 78.660.000,-	Rp. 53.529.840,-	68,05%
2.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Rp. 150.323.750,-**	**Rp. 143.067.000,-**	**95,17%**
	Penyediaan Makanan	Rp. 150.323.750,-	Rp.143.067.000,-	95,17%

Sumber: LRA Dinas Sosial Tahun 2025

4.6.5 Permasalahan Dan Solusi.

- Perbedaan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi riil di lapangan sering menyebabkan salah sasaran dalam pemberian layanan
- Perubahan status penduduk (pindah, meninggal, atau sudah mandiri secara ekonomi) sering kali tidak ter-update dengan cepat di sistem

pusat, sehingga target SPM menjadi tidak akurat.;

- Fasilitas yang ada terkadang belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, baik dari segi sanitasi maupun ruang gerak.;
- Pelayanan sosial sering dianggap sebagai sektor "biaya" tanpa imbal hasil ekonomi langsung bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sering kalah prioritas dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik;
- Koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan (untuk ODGJ) atau Dinas Kependudukan (untuk identitas) terkadang masih mengalami hambatan birokrasi.;

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran komprehensif atas dedikasi dan performansi birokrasi dalam mengeksekusi mandat konstitusional. Secara substansial, penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan progresivitas yang positif, tercermin dari akumulasi capaian **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome** yang secara konsisten merujuk pada target-target strategis dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan komitmen dan resiliensi manajerial yang tinggi dalam proses penyusunan laporan ini. Meski dihadapkan pada tantangan teknis berupa perubahan rumusan IKK Outcome yang terjadi hanya satu bulan pasca berakhirnya batas waktu penyusunan, Pemerintah Daerah tetap mampu melakukan rekonsiliasi data dan penyesuaian substansi secara tepat waktu. Kemampuan adaptasi ini membuktikan bahwa koordinasi antar OPD telah berjalan secara sinergis guna menjamin validitas dan akuntabilitas informasi kinerja yang disajikan kepada Pemerintah Pusat.

5.2. Catatan Evaluasi dan Tindaklanjut

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyadari bahwa capaian yang tertuang dalam laporan ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan instrumen evaluasi diri (*self-assessment*) untuk mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*) yang masih memerlukan akselerasi. Beberapa catatan strategis yang menjadi fokus perbaikan di masa mendatang meliputi:

1. **Akselerasi Transformasi Digital:** Memperkuat integrasi data antar-OPD guna meningkatkan akurasi pelaporan dan efektivitas layanan.
2. **Optimalisasi Urusan Pilihan:** Mempertajam inovasi pada sektor unggulan daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah

fluktuasi global.

3. **Penguatan Kapasitas Fiskal:** Meningkatkan kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan legal.

5.3. Harapan

Penyajian LPPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif kepada Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Segala masukan, rekomendasi, maupun hasil evaluasi dari pihak otoritas pusat akan dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan strategis dan perbaikan manajemen pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun. Semoga dokumen ini menjadi rujukan yang representatif bagi para pemangku kepentingan dan menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Labuan Bajo, 27 Maret 2026

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI, SE

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pendidikan	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini}}{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\ \%$	$\frac{7.216}{11.689} \times 100\ \%$	61,733 %	Dinas PKO
	1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\ \%$	$\frac{49.081}{50.139} \times 100\ \%$	97,89 %	Dinas PKO
	1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah}} \times 100\ \%$	$\frac{1.096}{1.596} \times 100\ \%$	68,67 %	Dinas PKO

	1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik / Jumlah seluruh toilet x 100 %	129 / 335 x 100 %	38,51 %	Dinas PKO
	1.a.5	Persentase ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik / Jumlah ruang kelas x 100 %	969 / 2.943 x 100 %	32,93 %	Dinas PKO

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Kesehatan	1.b.1	Persentase Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu tahun N / Jumlah ibu melahirkan tahun N x 100.000	8 / 4.684 x 100 %	0,17 %	Dinas Kesehatan
	1.b.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu / Jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama x 100 %	2.392 / 21.219 x 100 %	11,27 %	Dinas Kesehatan
	1.b.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100 %	3.858 / 4.812 x 100 %	80,17 %	Dinas Kesehatan
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100 %	4,462 / 4,684 x 100 %	95,26 %	Dinas Kesehatan

	1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x	100	%	4,517 / 4,670	x	100	%	96,72	%	Dinas Kesehatan
	1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 / Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	x	100	%	18,362 / 18,362	x	100	%	100	%	Dinas Kesehatan
	1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran / Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	x	100	%	41.552 / 41.552	x	100	%	100	%	Dinas Kesehatan
	1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam waktu satu tahun	x	100	%	120.136 / 170. 186	x	100	%	70,591	%	Dinas Kesehatan

	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) / Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (penyebut) x 100 %	17.737 / 20.354 x 100 %	87,14 %	Dinas Kesehatan
	1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100 %	13.165 / 15.682 x 100 %	83,95 %	Dinas Kesehatan
	1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. x 100 %	2,569 / 3,920 x 100 %	65,54 %	Dinas Kesehatan

	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	x	100 %	730 / 799	x 100 %	91,36	%	Dinas Kesehatan
	1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang yang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	x	100 %	1,925 / 1,927	x 100 %	99,90	%	Dinas Kesehatan
	1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang yang berisiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun yang sama	x	100 %	5,426 / 5,598	x 100 %	96,93	%	Dinas Kesehatan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik (Ha) / Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) x 100 %	1.152.08 / 6.403.52 x 100	17,99 %	Dinas SDABMBK
	1.c.2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) / Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) x 100 %	589,27 / 1.206,63 x 100 %	48,84 %	Dinas SDABMBK
	1.c.3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten/Kota pada tahun N / Jumlah total penduduk Kabupaten/Kota x 100 %	21.271 / 297.839 x 100 %	7,14 %	Dinas CKTRPKP
	1.c.4	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik / Jumlah rumah di Kabupaten/Kota x 100 %	40.054 / 59.291 x 100 %	67,55 %	Dinas CKTRPKP

	1.c.5	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha) / Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)	x	100 %	94,60 / 62.818,82	x	100 %	0,15	%	Dinas SDABMBK
			Catatan: kegiatan tahun 2025 tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran								
	1.c.6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) / Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	x	100 %	37,36 / 18.318,87	x	100 %	0,20	%	Dinas SDABMBK
			Catatan: kegiatan tahun 2025 tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran								
	1.c.7	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya / Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	x	100 %	217 / 217	x	100 %	100	%	Dinas CKTRPKP

	1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan / Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dituniuk	x 100 %	0 / 0 x 100 %	0,00	%	Dinas CKTRPKP
	1.c.9	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota Catatan: penyebut 375 merupakan target dari Pusat untuk setiap kabupaten/kota se Indonesia	x 100 %	75 / 75 x 100 %	100	%	Dinas SDABMBK
	1.c.10	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun / Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun	x 100 %	0 / 65 x 100 %	0,00	%	Dinas CKTRPKP

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N / Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N x 100 %	4 / 10 x 100 %	40,00% %	Dinas CKTRPKP
	1.d.2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N / Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N x 100 %	0 / 44,56 x 100 %	0,000 %	Dinas CKTRPKP
	1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N / Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N x 100 %	75 / 24.052 x 100 %	0,31% %	Dinas CKTRPKP
	1.d.4	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N / Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N x 100 %	0 / 0 x 100 %	0,00 %	Dinas CKTRPKP

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N / Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontiiensi (Rekon) = 3 x 100 %	3 / 3 x 100 %	33,33 %	BPBD
	1.e.2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan x 100 %	39 / 39 x 100 %	100,00 %	Sat. Pol PP
	1.e.3	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi x 100 %	7 / 49 x 100 %	14,29 %	Sat. Pol PP

	1.e.4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	x	100 %	4.635 / 4.635	x	100 %	100	%	BPBD
	1.e.5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	x	100 %	506 / 506	x	100 %	100	%	BPBD
	1.e.6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten /kota dalam tingkat waktu tanggap / Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	x	100 %	18 / 23	x	100 %	78,26	%	Sat. Pol PP

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Sosial	1.f.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial x 100 %	711 / 2.712 x 100 %	26,22 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.f.2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen x 100 %	469 / 1.202 x 100 %	39,02 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.f.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen x 100 %	505 / 6.683 x 100 %	7,56 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	x 100 %	3 / 3	x 100 %	100 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.f.5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	x 100 %	1.083 / 1.083	x 100 %	100,00 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.f.6	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	x 100 %	1.693 / 53.513	x 100 %	3,16 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100 %	6 / 21 x 100 %	28,57 %	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	2.a.2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x 100 %	47 / 696 x 100 %	6,75 %	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	2.a.3	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota x 100 %	2.829 / 2.829 x 100 %	100 %	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100 %	32 / 32 x 100 %	100 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.b.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif / Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang x 100 %	64 / 64 x 100 %	100 %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pangan	2.c	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota / Target Jumlah Cadangan Pangan x 100 %	37,90 / 92,25 x 100 %	41,08 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pertanahan	2.d.1	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah / Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah x 100 %	1.673.075 / 16.806.979 x 100 %	9,95 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting / Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting x 100 %	0 / 0 x 100 %	0,00 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal / Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah x 100 %	3 / 15 x 100 %	20,00 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Lingkungan Hidup	2.e.1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota / Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung x 100 %	58 / 74 x 100 %	78,38 %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
	2.e.2	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah / Jumlah seluruh timbulan sampah x 100 %	30.734,50 / 53.768,70 x 100 %	57,16 %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Administrasi Kependudukan dan	2.f.1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0 – 17 tahun x 100 %	86.545 / 95.793 x 100 %	90,35 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Anak yang Memiliki KIA / Jumlah anak wajib KIA x 100 %	37.452 / 37.452 x 100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.3	Jumlah Data Profil Kependudukan	Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan / 2 (Dua) Dokumen x 100 %	2 / 2 x 100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.4	Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik / Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas x 100 %	203.546 / 207.006 x 100 %	98,33 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan x 100 %	575 / 575 x 100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

	2.f.6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan x 100 %	97.635 / 97.635 x 100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.f.7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan / Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan x 100 %	348 / 348 x 100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun / Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) x 100 %	29 / 49 x 100 %	59,18 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun / Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N) x 100 %	4 / 102 x 100 %	3,92 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	2.g.3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku / Jumlah kerja sama desa yang ditangani x 100 %	47 / 164 x 100 %	28,66 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pengendalian Penduduk dan KB	2.h.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR Kab/Kota / Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang bersangkutan x 100 %	2,64 / 3,06 x 100 %	**86,27** %	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	2.h.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern / Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun x 100 %	24.378 / 43.068 x 100 %	**56,60** %	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	2.h.3	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota / Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan x 100 %	6,69 / 16,86 x 100 %	**39,68** %	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Perhubungan	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) - KTD= Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) - KTL=Konektivitas Transportasi Laut - WTL=Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Keterangan : 1. aBobot WTD dn WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. 2. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).	KTD = 0,77 WTD = 65,8 KTL = 0,42 WTL = 34,2 KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) KTdaerah = (0.77 x 65,8) + (0.42 x 34,2) KTDaerah = 5,07 + 14,4 KTDaerah = 0,65	0,65	Dinas Perhubungan
	2.i.2	Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Rasio Volume/Capacity	0,37	Dinas Perhubungan
	2.i.3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \times 100\ \%$	$\frac{176}{176} \times 100\ \%$	100 %	Dinas Perhubungan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Komunikasi & Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah x 100 %	42 / 43 x 100 %	97,67 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x 100 %	12 / 14 x 100 %	85,71 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.j.3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota / Jumlah penduduk x 100 %	168.133 / 197.347 x 100 %	85,20 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$\frac{\Sigma \text{ Volume usaha koperasi tahun berjalan} - \Sigma \text{ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya}} \times 100\ \%$	$\frac{479.732.597}{2.827.493.418} \times 100\ \%$	16,97 %	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	2.k.2	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	$\frac{\Sigma \text{ Usaha Mikro yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)}}{\Sigma \text{ Usaha Mikro}} \times 100\ \%$	$\frac{1.604}{12.398} \times 100\ \%$	12,94 %	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kab/kota / Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kab/kota x 100 %	951 / 951 x 100 %	100 %	Dinas PKO
	2.m.2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota / Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kab/kota x 100 %	150 / 88.229 x 100 %	0,17 %	Dinas PKO
	2.m.3	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi / Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) x 100 %	16 / 80 x 100 %	20,00 %	Dinas PKO
	2.m.4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet peraih medali / Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional x 100 %	1 / 2 x 100 %	50,00 %	Dinas PKO

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Penanaman Modal	2.I.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah nilai Investasi tahun N-1 di Kab/Kota / Jumlah Nilai Investasi Tahun N-1 di Kab/Kota x 100 %	953.058.425.874 / 930.055.667.658 x 100 %	102,47 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	2.I.2	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Total realisasi investasi kab/kota / Target investasi Kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kab/kota yang bersangkutan x 100 %	1.883.114.093.532 / 960.000.000.000 x 100 %	196,16 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Statistik	2.n	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah x 100 %	163 / 163 x 100 %	100 %	Dinas Kominfo

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Persandian	2.o	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi / Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918) x 100 %	27 / 918 x 100 %	2,94 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Kebudayaan	2.p.1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan / Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan x 100 %	9 / 9 x 100 %	100 %	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
	2.p.1	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	Jumlah Kinjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1 / Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1 x 100 %	- 94 / 197 x 100 %	-47,72 %	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Perpustakaan	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	·(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca)· x 100	**Rumus Penghitungan Nilai TKM :** TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100 Dimensi Pra Membaca = 55, 6 Dimensi Saat Membaca = 61, 67 Dimensi Pasca Membaca = 66, 41 **Nilai TKM = 62,5**	62,5	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPM : ·(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)· x 100	IPM : ·(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)· x 100 **Dimensi Kepatuhan = 0, 036** - Variabel Koleksi = 0, 017 - Variabel Tenaga Perpustakaan = 0, 054 **Dimensi Kinerja = 0, 02** - Variabel Pelayanan = 0, 016 - Variabel Penyelenggaraan/ Pengelolaan = 0, 025 **Nilai IPLM = 2,49**	2,49	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Kearsipan	2.r	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	a = 100% i = 100% s = 100% j = 23,03	T = (a + i + s + j) / 4 T = (100 + 100 + 100 + 23,03) / 4 T = 323,03 / 4 **T = 80,76%**	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton) / Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) x 100 %	8.772,205 / 7.499,60 x 100 %	116,97 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3.a.2	Angka Konsumsi Ikan	$Angka_{KI} = Angka_{KRT} + Angka_{KLRT} + Angka_{KTT}$ Keterangan: $Angka_{KI}$: Angka konsumsi ikan $Angka_{KRT}$: Angka konsumsi rumah tangga $Angka_{KLRT}$: Angka konsumsi luar rumah tangga $Angka_{KTT}$: Angka konsumsi tidak tercatat	20,8 0,00 0,00	20,8 Kg	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pariwisata	3.b.1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) / Realisasi Investasi tahun N x 100 %	1.628.937.221.296 / 1.883.114.093.532 x 100 %	86,50% %	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
	3.b.2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	Jumlah wisatawan asing tahun N - Jumlah wisatawan asing tahun N-1 / Jumlah wisatawan asing tahun N-1 x 100 %	114.680 / 257.611 x 100 %	44,52 %	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
	3.b.3	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun N - Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1 / Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1 x 100 %	- 25.826 / 153.738 x 100 %	-16,80 %	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Pertanian	3.c.1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 / Produksi tanaman pangan tahun N-1 x 100 %	-33.037,63 / 279.329,79 x 100 %	-11,83 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan
	3.c.2	Persentase peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 / Produksi hortikultura tahun N-1 x 100 %	-5591,69 / 30300,81 x 100 %	-18,45 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan
	3.c.3	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1 / Produksi komoditas peternakan tahun N-1 x 100 %	-1.074,73 / 1.212,36 x 100 %	-88,65 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan
	3.c.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini / Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis x 100 %	179,34 / 3.141,57 x 100 %	5,71 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Perdagangan	3.d.1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku / Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota x 100 %	94 / 401 x 100 %	23,44 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK		RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Perindustrian	3.e.1	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	1.	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:	0	0,00 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			-	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: • Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% • Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% • Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24%			
			-	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) =27% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% • Dan seterusnya. • Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12%			
			-	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4%			
			-	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% • Dan seterusnya			

			-	Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5) dikalikan bobot IKK Outcome 40%				
	3.e.2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional		Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional / Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah x 100 %	105 / 2.766 x 100 %	3,80 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.e.3	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah industry kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 / Jumlah industry kecil dan menengah tahun N-1 x 100 %	288 / 2.478 x 100 %	11,62 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.e.4	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor		Jumlah investasi sektor industri / Total investasi seluruh sektor x 100 %	11.481.660.000 / 1.883.114.093.532 x 100 %	0,61 %	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	4.a.	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan / Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden x 100 %	16 / 17 x 100 %	94,12 %	Bappeda

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	4.b.1	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) / Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah x 100 %	438.936.448.153,33 / 1.331.846.765.781,07 x 100 %	32,96 %	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Realisasi Pendapatan Daerah x 100 %	286.390.515.490,24 / 1.314.461.555.275,24 x 100 %	21,79 %	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	4.b.3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N / Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N x 100 %	727.968.079.769,14 / 798.629.231.825,66 x 100 %	91,15 %	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	4.b.4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa x 100 %	259.796.253.974,24 / 1.116.030.998.895,07 x 100 %	23,28 %	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.d	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	1.180 / 1.427 x 100 %	82,69 %	BKPSDMD

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	4.a.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah / Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah x 100 %	35 / 35 x 100 %	100 %	Brida

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	4.e.1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: 1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; 2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; 3. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; 4. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan 5. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	Nilai Capaian (1, 2, 3, 4 dan 5)	3,020	Inspektorat
	4.e.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 2; b. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; c. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan d. Dievaluasi - dengan hasil level 3, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada	Nilai Capaian (1, 2, 3, 4 dan 5)	2,16	Inspektorat

	4.e.3	Manajemen Risiko Indeks	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; b. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; c. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; d. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan e. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko	Nilai Capaian (1, 2, 3, 4 dan 5)	2,830	Inspektorat
	4.e.4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1 / Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1 x 100 %	839 / 1000 x 100 %	83,90 %	Inspektorat

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	4.f.1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.f.2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan		22,94	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
	4.f.3	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa		0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat Waktu; dan 2. Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD
	4.g.2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	$\frac{\text{Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan Tahun N}}{\text{Jumlah rancangan peraturan daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah Tahun N}} \times 100\ \%$	$\frac{4}{9} \times 100\ \%$	44,44 %	Bagian Hukum

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2025
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diisi oleh Sekda, Sumber data dari OPD Teknis

URUSAN	NO	IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanann Publik	4.h	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	89,62	Bagian Organisasi